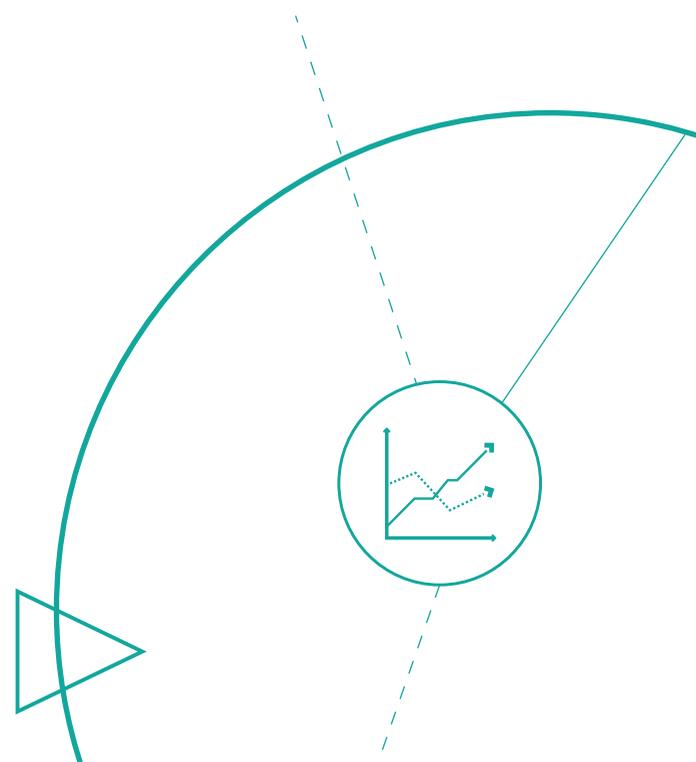




• • •

INFORMASI STATISTIK

INFRASTRUKTUR
PUPR **2021**



**Disusun oleh:**

Pusat Data dan Teknologi
Informasi Sekretariat Jenderal,
Kementerian PUPR

Kontributor:

Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal CiptaKarya
Direktorat Jenderal Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur PUPR
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Badan Pusat Statistik

**NAZIB FAIZAL**

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 dapat diselesaikan. Adapun buku ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PUPR dan Sistem Informasi Statistik PUPR.

Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat merupakan provinsi serta analisis statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran perbaikan dari semua pihak/pembaca senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan datang.

Jakarta, November 2021
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Nazib Faizal



DAFTAR ISI

BUKU INFORMASI STATISTIK
Infrastruktur PUPR 2021



Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

5
6
8

Gambaran Umum Indonesia

Geografi Wilayah	12
Administrasi Wilayah	16
Demografi Wilayah	18
Ekonomi Wilayah	22

APBN PUPR

28

Sumber Daya Air

205 Bendungan Eksisting	36
Menatap Jauh Ketahanan Air Indonesia	40
Sebaran Jumlah Danau, Situ, Embung, dan Kolam Retensi	42

Bina Marga

Jalan Nasional	46
Jalan Tol	50
Jembatan	54



Cipta Karya

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	60
Instalasi Pengolahan Air Limbah	62
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	64
Tempat Pembuangan Akhir	66
Pengembangan Kawasan Permukiman	68

Perumahan

Rumah Susun	76
Rumah Khusus	79
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	82

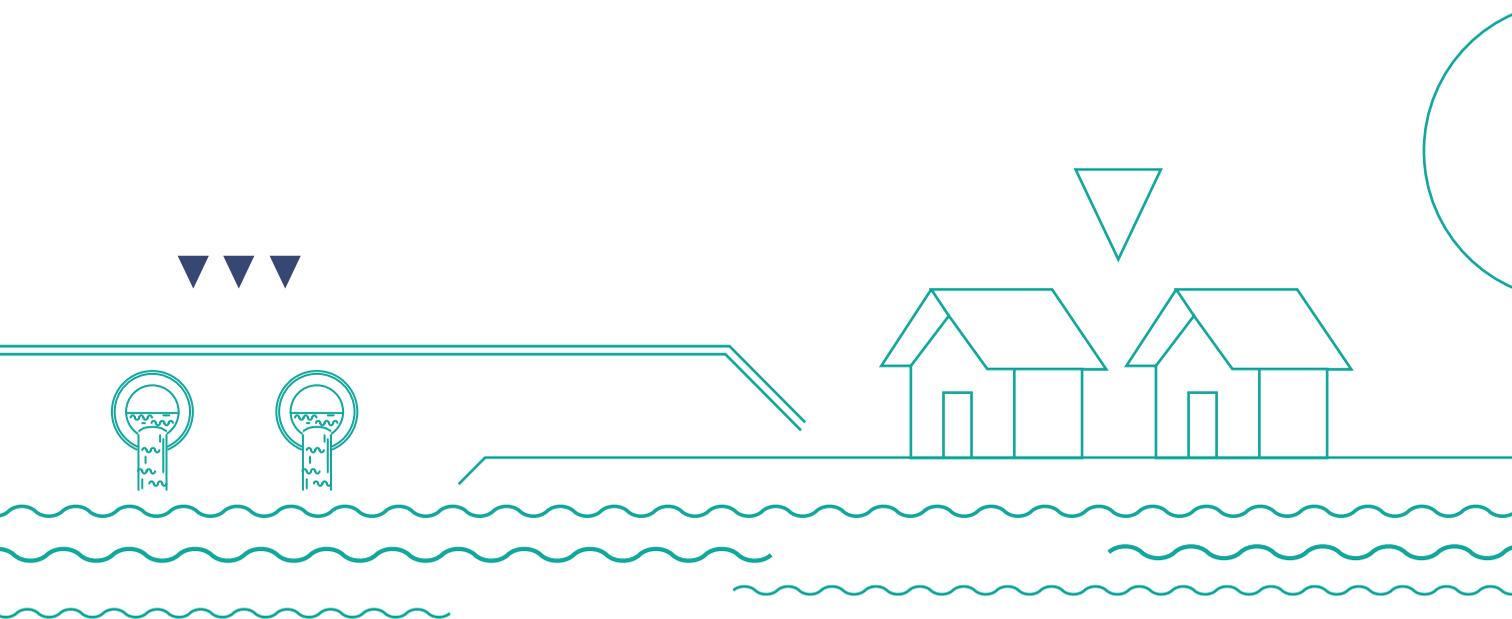
Bina Konstruksi

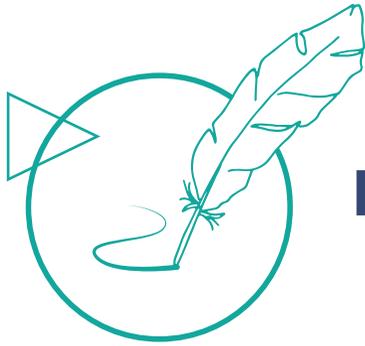
Badan Usaha Jasa Konstruksi	88
Tenaga Kerja Konstruksi	91

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia PUPR	100
Pengarusutamaan Gender	104

Penutup	108
---------	-----





PENDAHULUAN

▼ Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya, serta perumahan. Proses pembangunan infrastruktur perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan pemanfaatan pembangunan. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai

unit pengelola dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual bidang infrastruktur PUPR melalui Bidang Data dan Informasi (BDI). BDI memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik. Secara garis besar Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan gambaran tentang hasil pembangunan infrastruktur PUPR yang disajikan melalui infografis disertai dengan analisis statistik. Data tersebut terkait bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, serta data sektor pendukung lainnya.



Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini adalah untuk menyajikan data dan informasi statistik terkait bidang infrastruktur PUPR. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi lainnya, serta masyarakat umum.



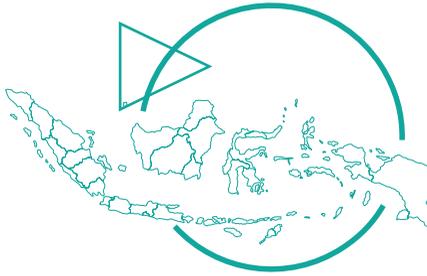
GAMBARAN UMUM
INDONESIA





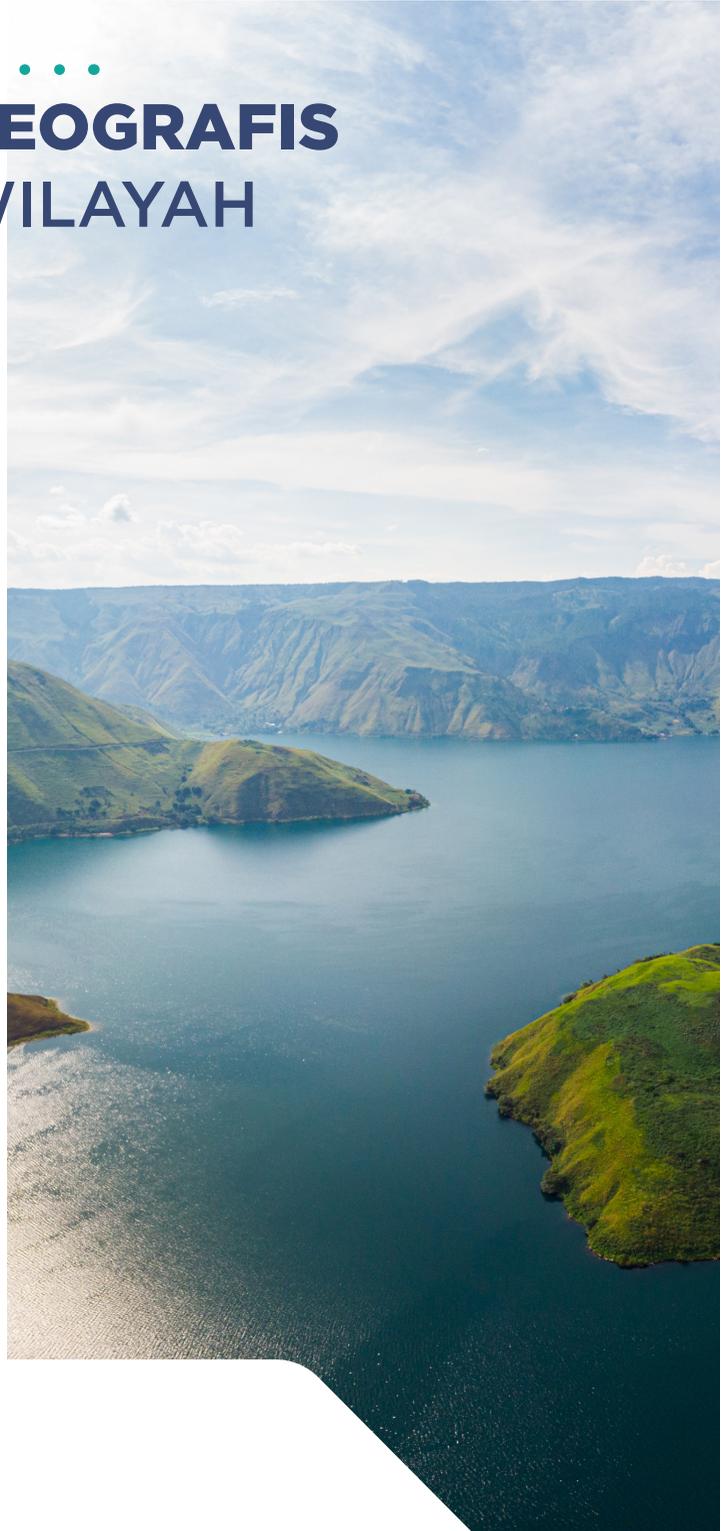
CONTENT

- • • • •
- ▶ Geografi Wilayah
- ▶ Administrasi Wilayah
- ▶ Demografi Wilayah
- ▶ Ekonomi Wilayah



..... GEOGRAFIS WILAYAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.916.906,77 km². Secara astronomi Indonesia terletak antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94° 58' 21" Bujur Timur – 141° 01' 10" Bujur Timur. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa.





BATAS-BATAS NEGARA **INDONESIA**



Sebelah Utara

Negara Malaysia, Singapura,
Vietnam, Filipina, Thailand,
Palau, dan Laut Cina Selatan

Sebelah Selatan

Negara Australia, Timor Leste,
dan Samudera Hindia

Sebelah Barat

Samudera Hindia

Sebelah Timur

Negara Papua Nugini dan
Samudera Pasifik

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Persentase luas Pulau Kalimantan sebesar 28,38% dari luas Indonesia atau seluas 544.150,07 km². Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk negara Papua Nugini). Wilayah terluas berdasarkan provinsi adalah Provinsi Papua, dengan luas wilayah 421.991,20 km² atau sebesar 22,01%. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu Provinsi Papua Barat sebanyak 4.108 pulau.



Sumber

- Kementerian Dalam Negeri
- Statistik Indonesia 2021

KALIMANTAN



544.150,07 Km²

28,38%

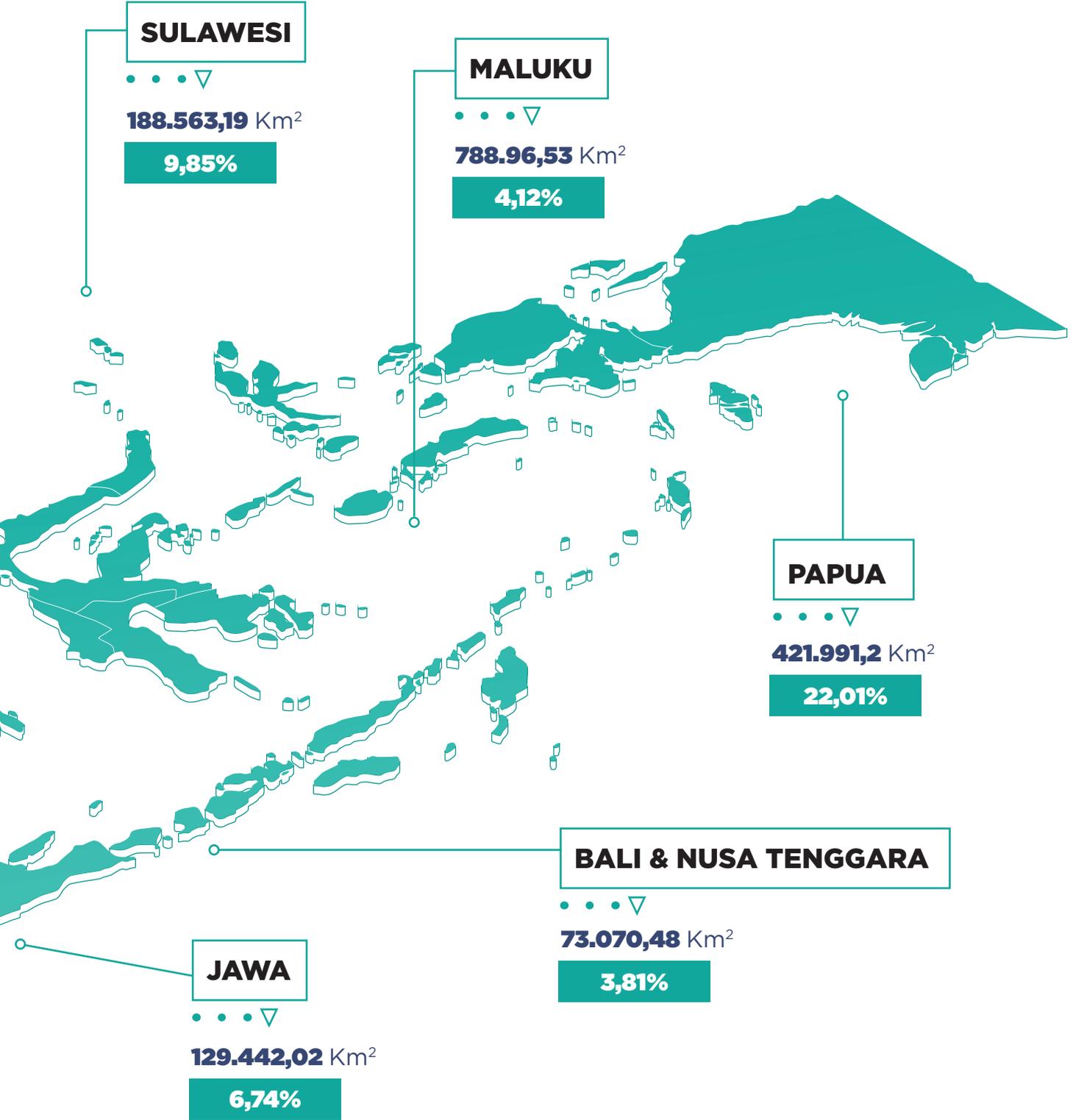
SUMATERA

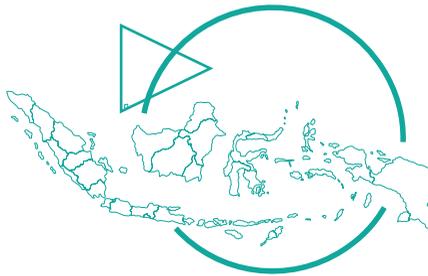


480.793,28 Km²

25,09%







ADMINISTRASI WILAYAH

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Indonesia memiliki 34 provinsi, setelah Kalimantan Utara ditetapkan menjadi provinsi pada tahun 2012. Tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki 416 kabupaten dan 98 kota. Provinsi Jawa Tengah dan

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 29 kabupaten. Provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota. Jumlah kecamatan dan desa di Indonesia sejak tahun 2015-2019 selalu bertambah dan pada tahun 2019 terdapat 7.252 kecamatan dan 83.820 desa

KABUPATEN



416

KOTA



98

KECAMATAN

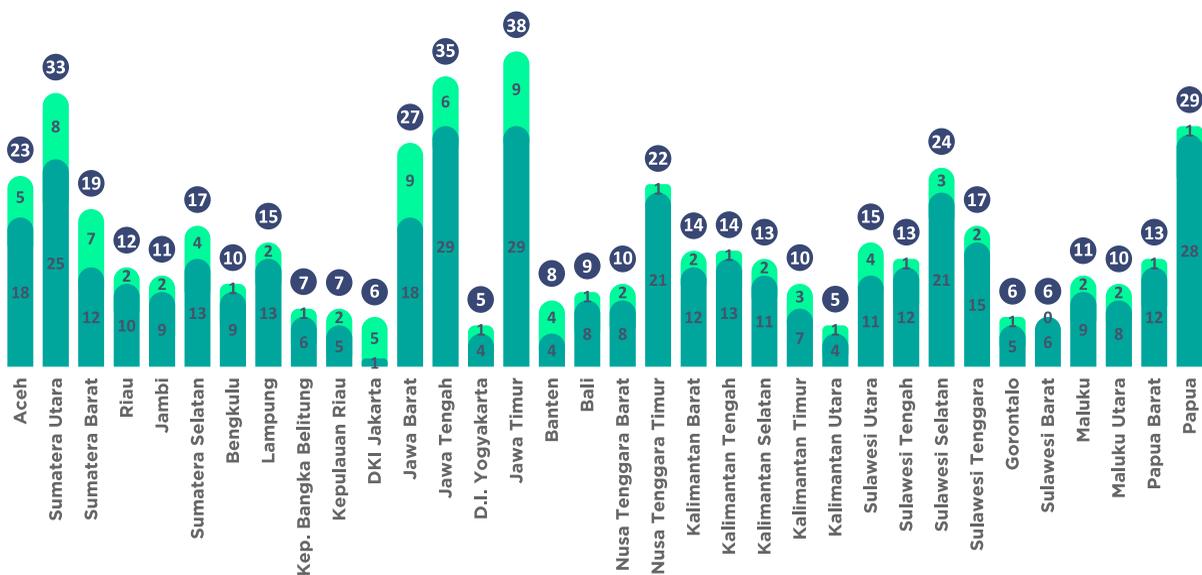


7.252

DESA



83.820



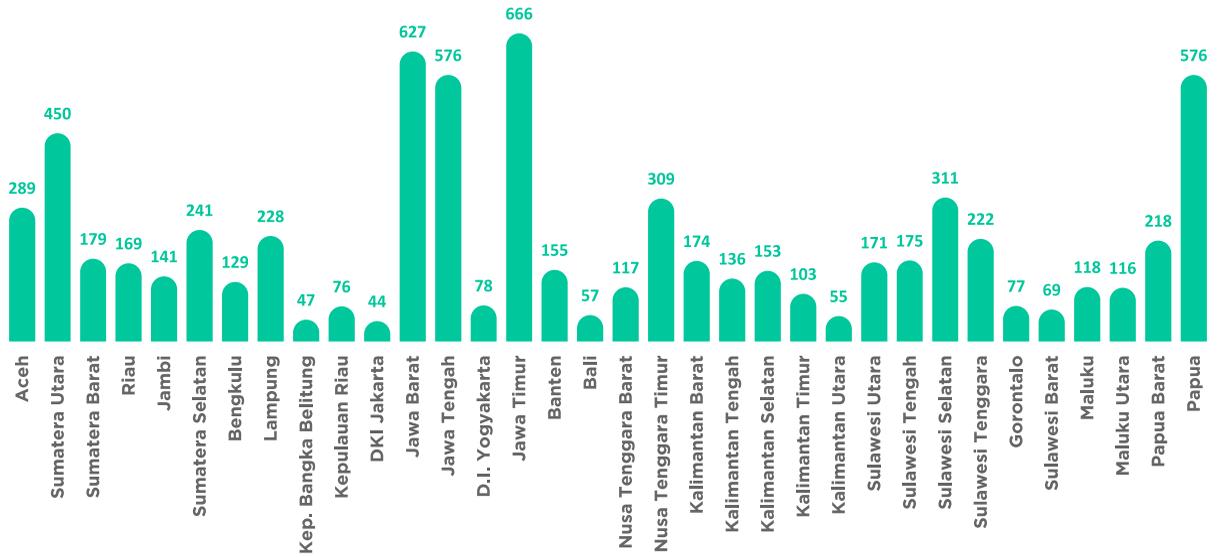
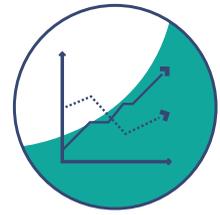
Keterangan



Kota



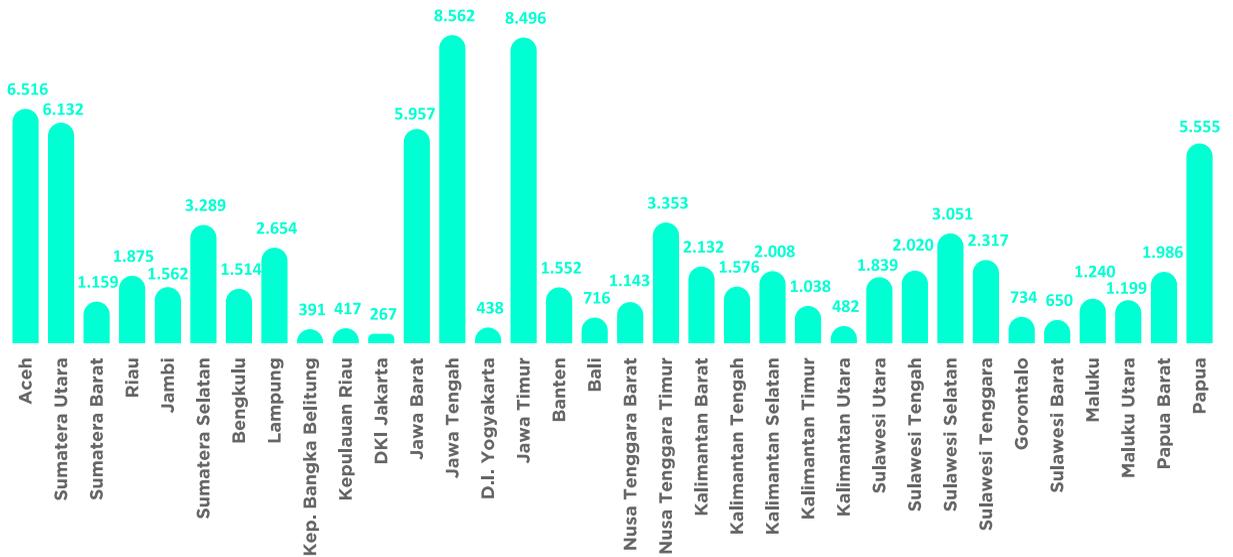
Kabupaten



Keterangan



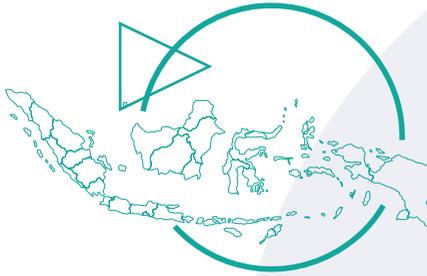
Kecamatan



Keterangan



Desa



..... DEMOGRAFI WILAYAH

Indonesia merupakan negara majemuk. Sebagai negara kesatuan kemajemukan tak lantas membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak. Sebagai mana semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam namun tetap satu. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia.

Menurut data BPS terdapat sekitar 1.300 suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah populasinya sebanyak 95,2 juta jiwa atau sebesar 40% dari populasi Indonesia. Terdapat sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, jumlah ini melebihi jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia.

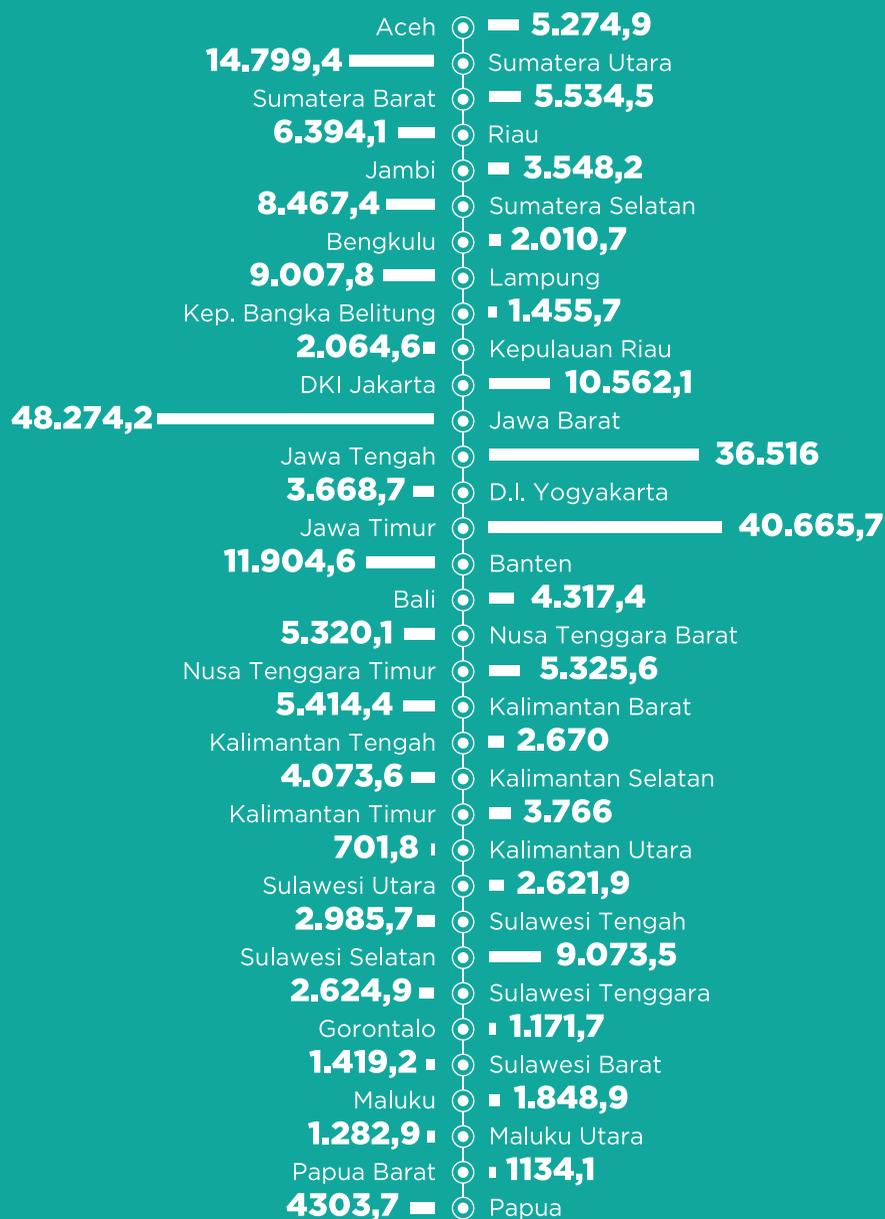
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (bulan Mei) adalah 237.641,3 ribu jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 270.204 ribu jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 48.274,2 ribu jiwa, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 40.665,7 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,33%.

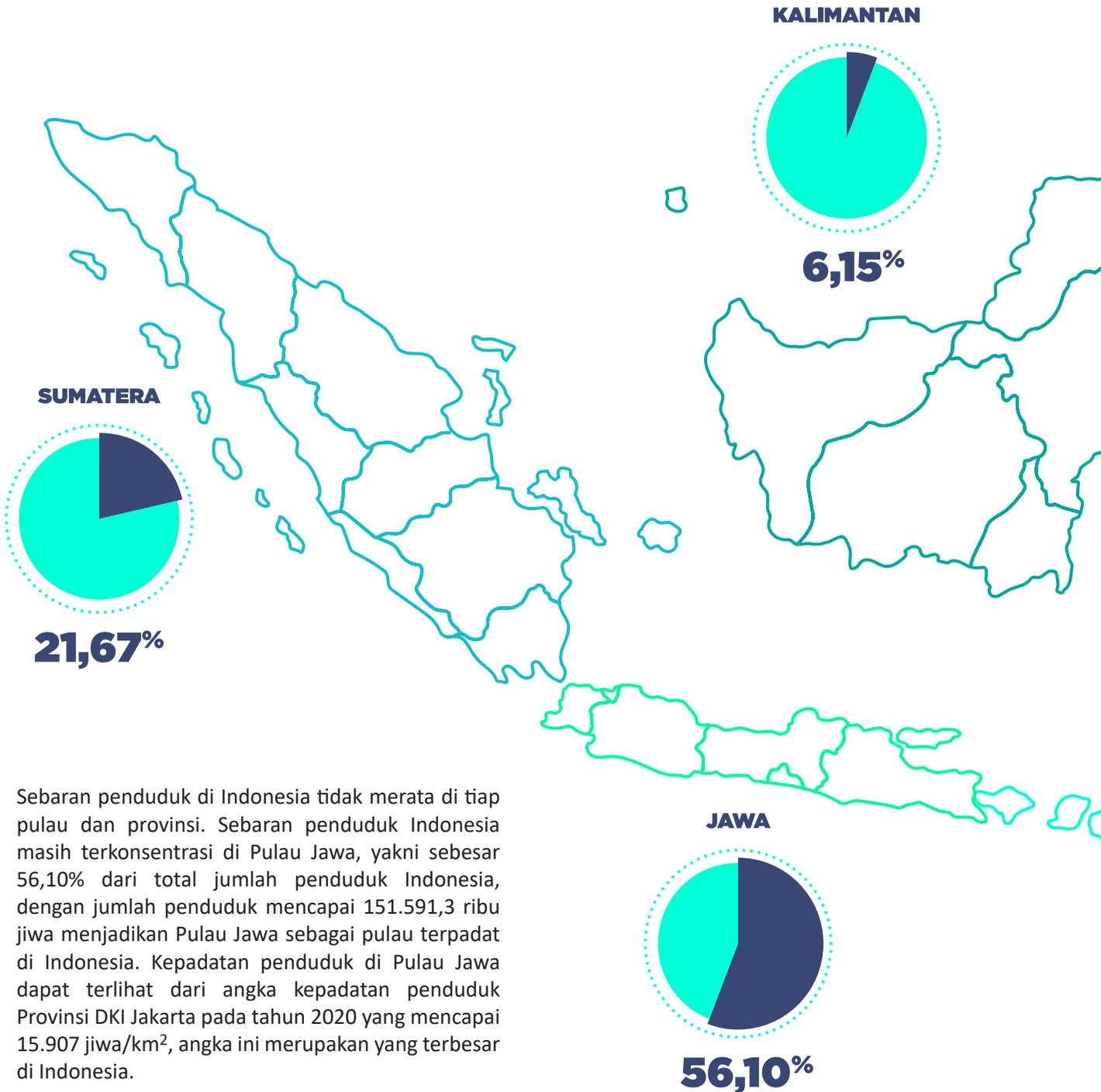


Sumber

BPS, Kementerian Dalam Negeri, Statistik Indonesia 2021

Jumlah Penduduk Tahun 2021

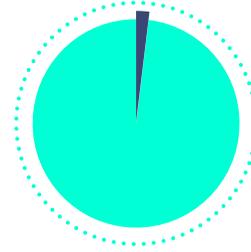
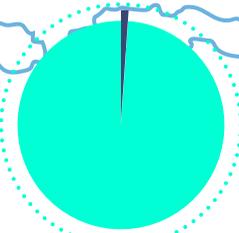
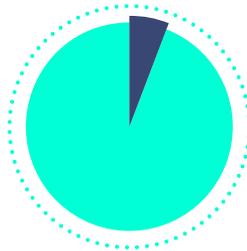


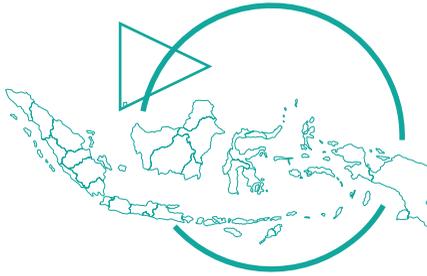


Sebaran penduduk di Indonesia tidak merata di tiap pulau dan provinsi. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 56,10% dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 151.591,3 ribu jiwa menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dapat terlihat dari angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 yang mencapai 15.907 jiwa/km², angka ini merupakan yang terbesar di Indonesia.



Sumber
BPS, Kementerian Dalam Negeri, Statistik
Indonesia 2021

SULAWESI**7,36%****PAPUA****2,01%****MALUKU****1,16%****BANUSTR****5,54%**



..... EKONOMI WILAYAH

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, sedangkan pada tingkat regional (provinsi) kondisi ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB dan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Perhitungan nilai PDB dan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan nilai PDB atas dasar harga konstan paling tinggi sejak tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,38% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau sebesar 2.016.876,90 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat menjadi 2.209.920,3 miliar rupiah pada tahun 2020 atau sebesar 20,61%. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor tertinggi kedua dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016-2020 yaitu 1.386.695,4 miliar rupiah atau sebesar 12,93%.

Sumber

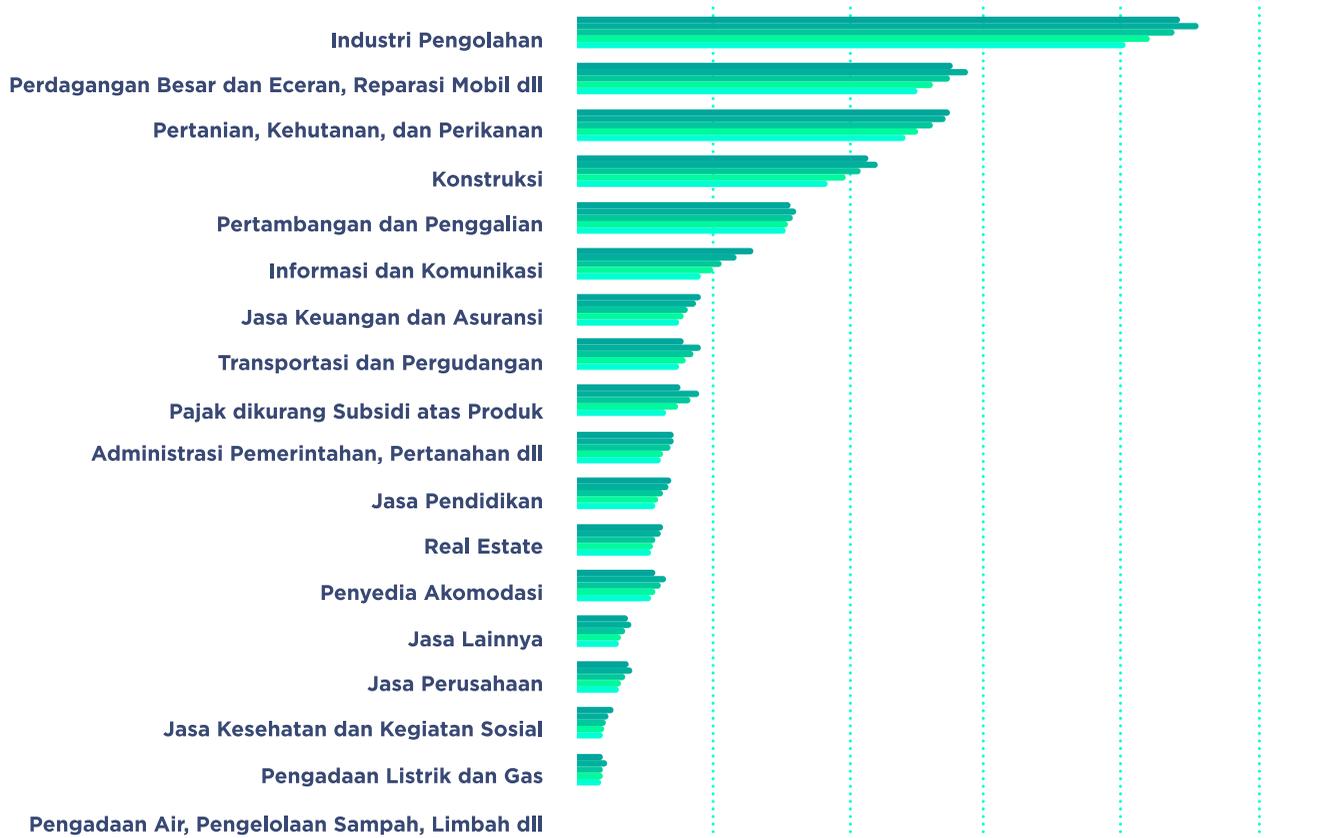
Badan Pusat Statistik RI, didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya, Statistik Indonesia 2021





PDB atas Dasar Harga Konstan

Catatan
 *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara



Keterangan

▶	2020**	2019*	2018	2017	2016
---	--------	-------	------	------	------

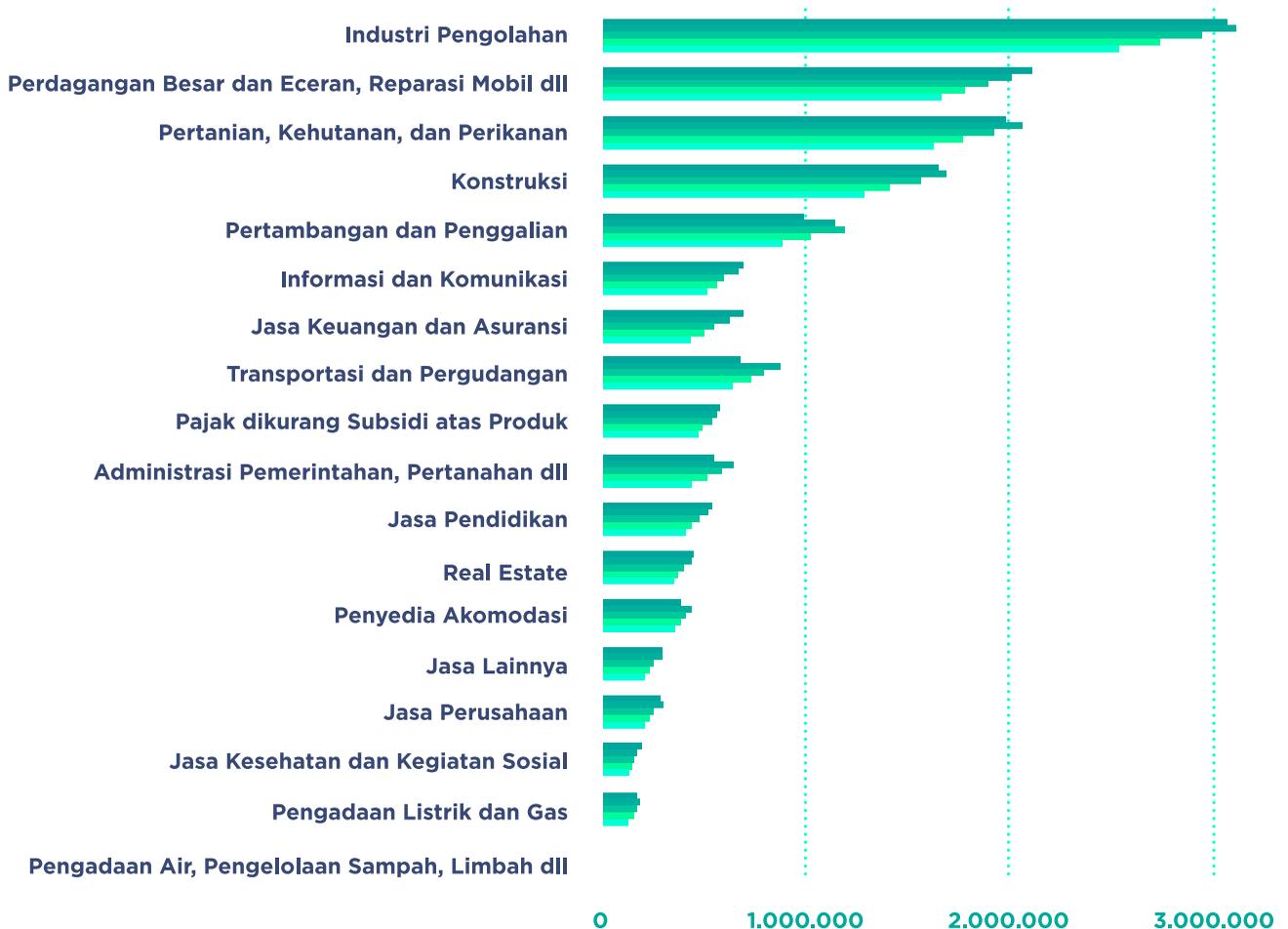
Dalam periode empat tahun, lapangan usaha pada sektor industri pengolahan memiliki nilai PDB atas dasar harga berlaku tertinggi. Pada tahun 2016 nilai PDB atas dasar harga berlaku pada lapangan usaha sektor industri pengolahan sebesar 2.545.203,60 miliar rupiah atau sebesar 20,52% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.069.041,7 miliar rupiah atau sebesar 19,88%. Sektor kedua yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional yaitu lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 2.115.086,1 miliar rupiah atau sebesar 13,70%

PDB atas Dasar Harga Berlaku

Catatan

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Sumber

Badan Pusat Statistik RI, didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya, Statistik Indonesia 2021

Keterangan



2020**

2019*

2018

2017

2016

Laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil, dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan, dasar pembuatan prakiraan bisnis khususnya persamaan penjualan. Perkembangan laju pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia sangat fluktuatif, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan kumulatif PDB mengalami penurunan hingga -2,07 pada tahun 2020.

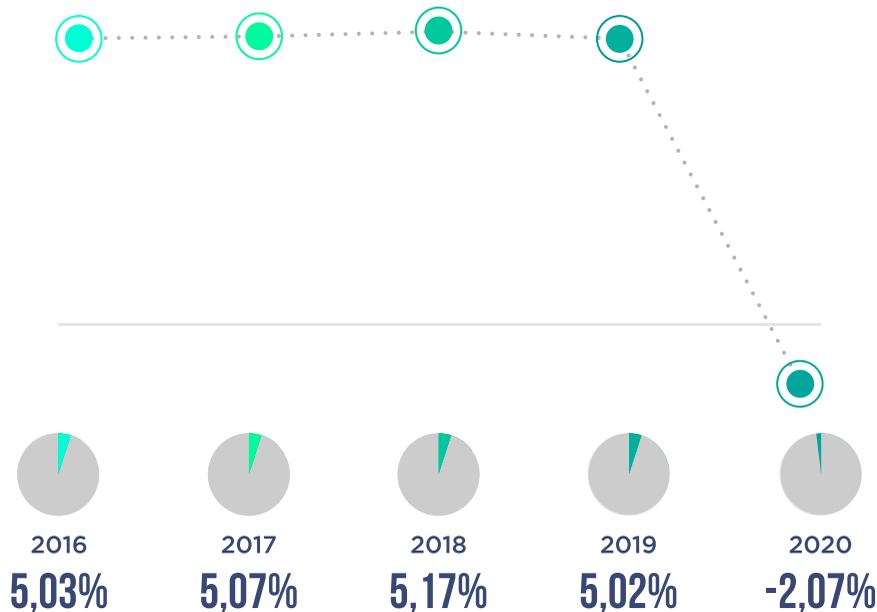


Laju Pertumbuhan PDB

Catatan

*) Angka Sementara

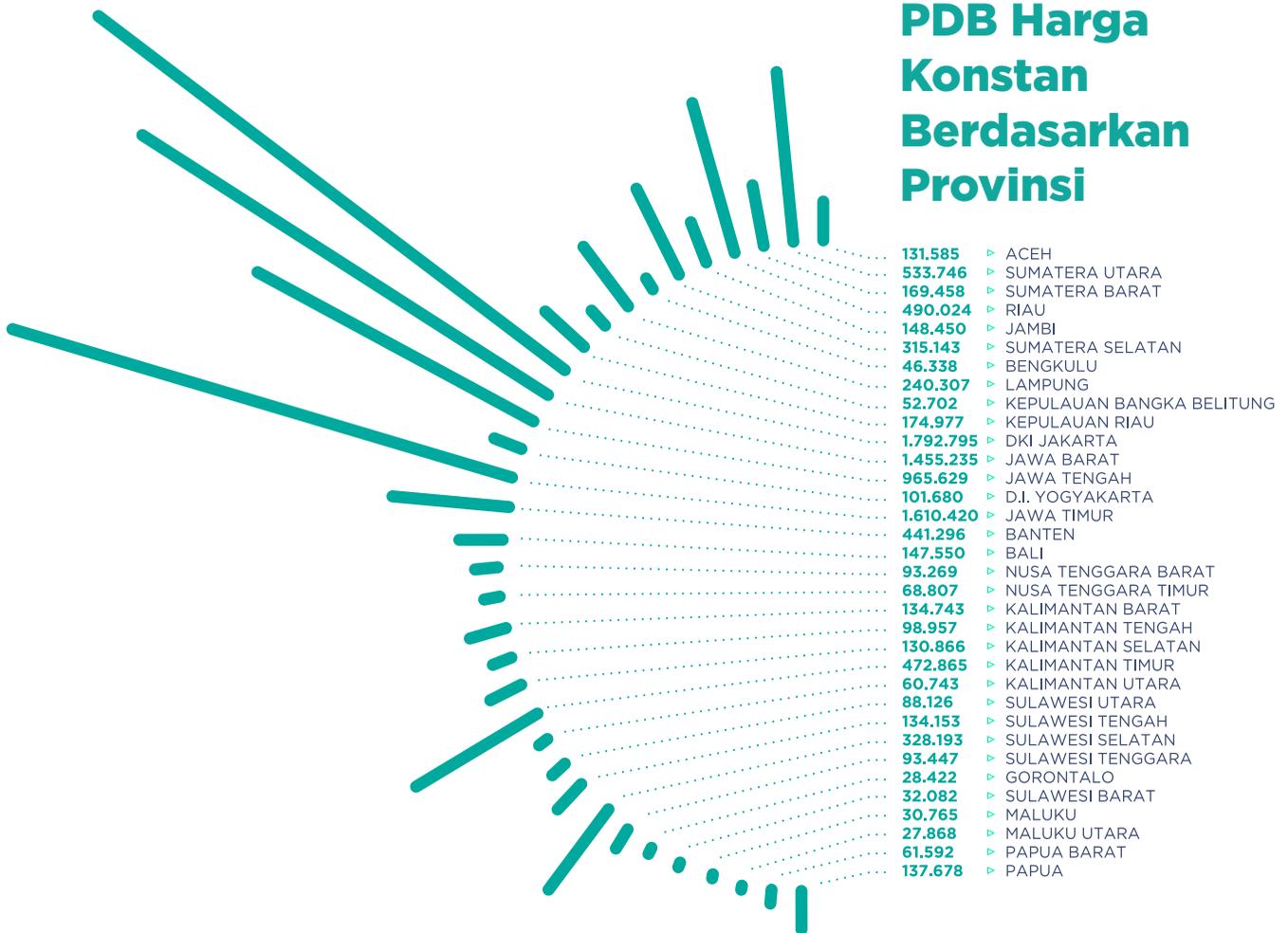
***) Angka Sangat Sementara



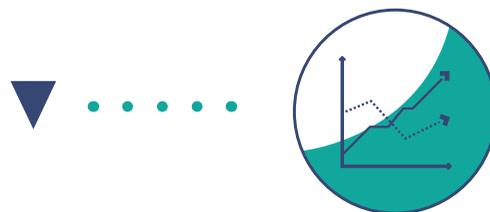
Indikator ekonomi makro di suatu provinsi salah satunya adalah PDRB. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta merupakan

provinsi dengan PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku yang paling tinggi yaitu 1.838.501 miliar rupiah dan 2.840.828 miliar rupiah.

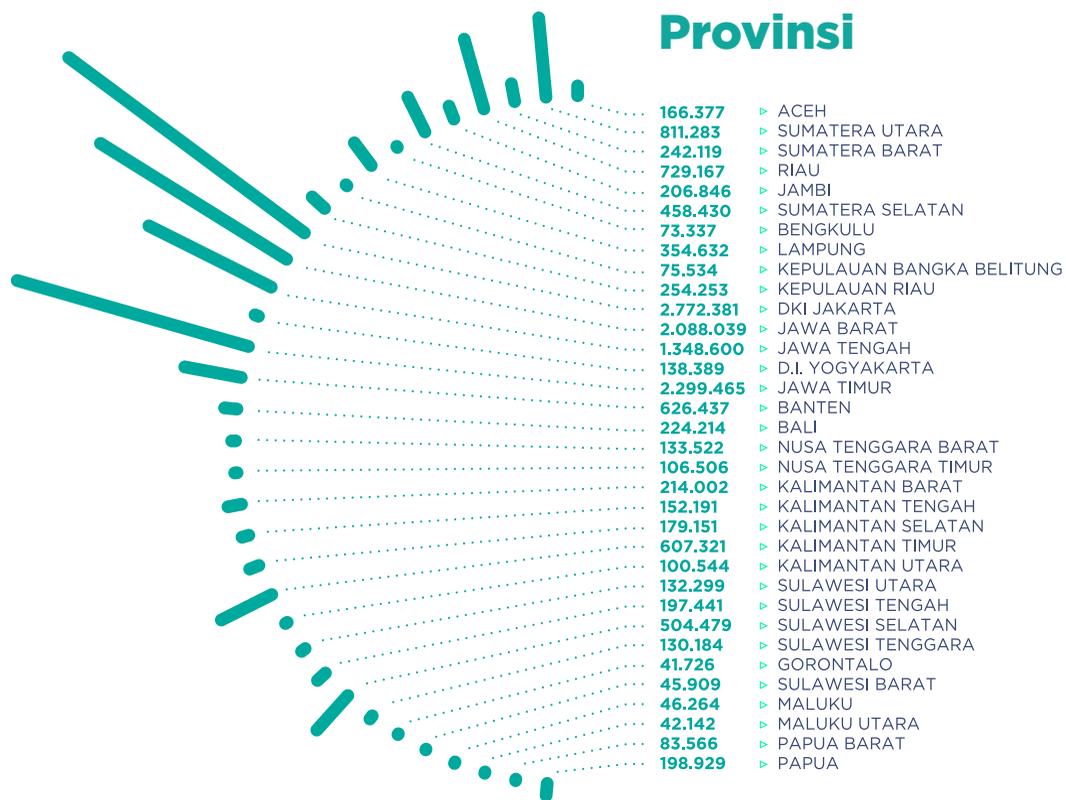
Nilai PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku terendah adalah Provinsi Maluku Utara, masing-masing sebesar 26.586 miliar rupiah dan 39.716 miliar rupiah.



Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun 2015 mencapai 4,99% meningkat menjadi 5,32% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5%. Provinsi Lampung dan Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB tiap tahunnya. Sedangkan yang mengalami fluktuasi ekstrim adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua

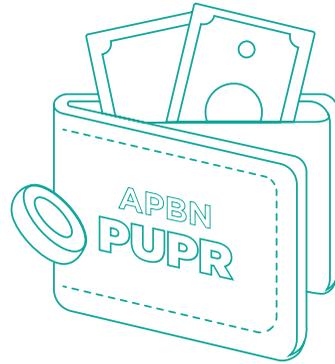


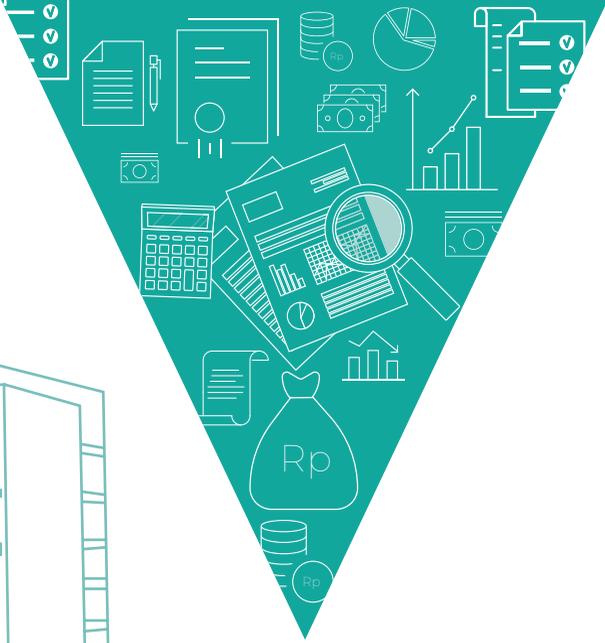
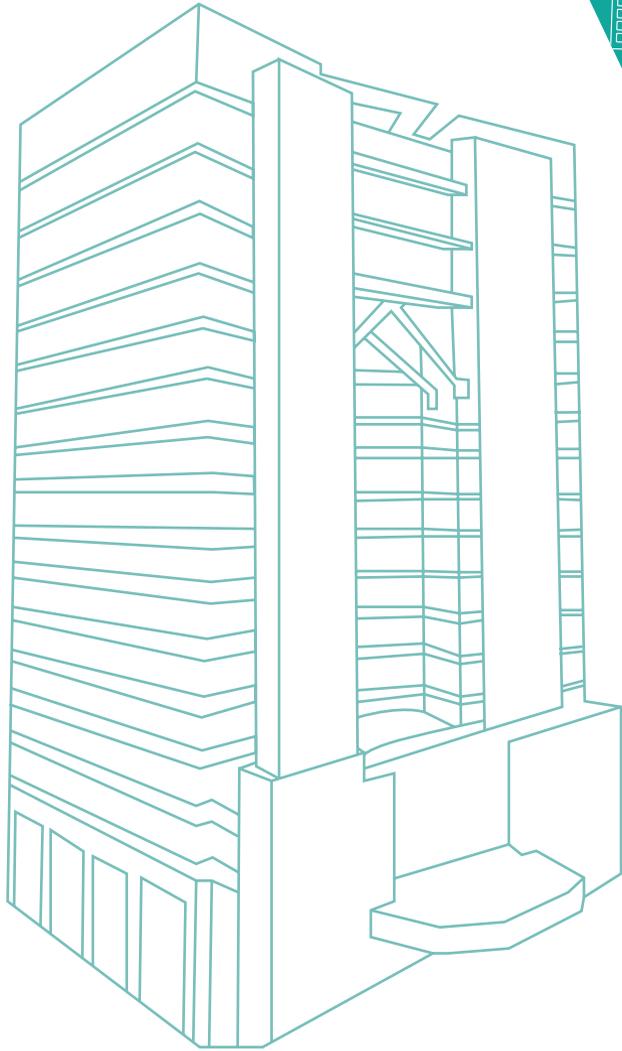
PDB Harga Berlaku Berdasarkan Provinsi





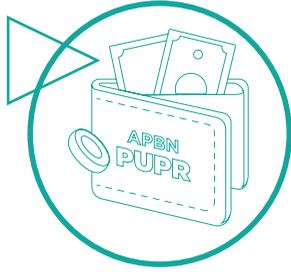
APBN
PUPR





CONTENT

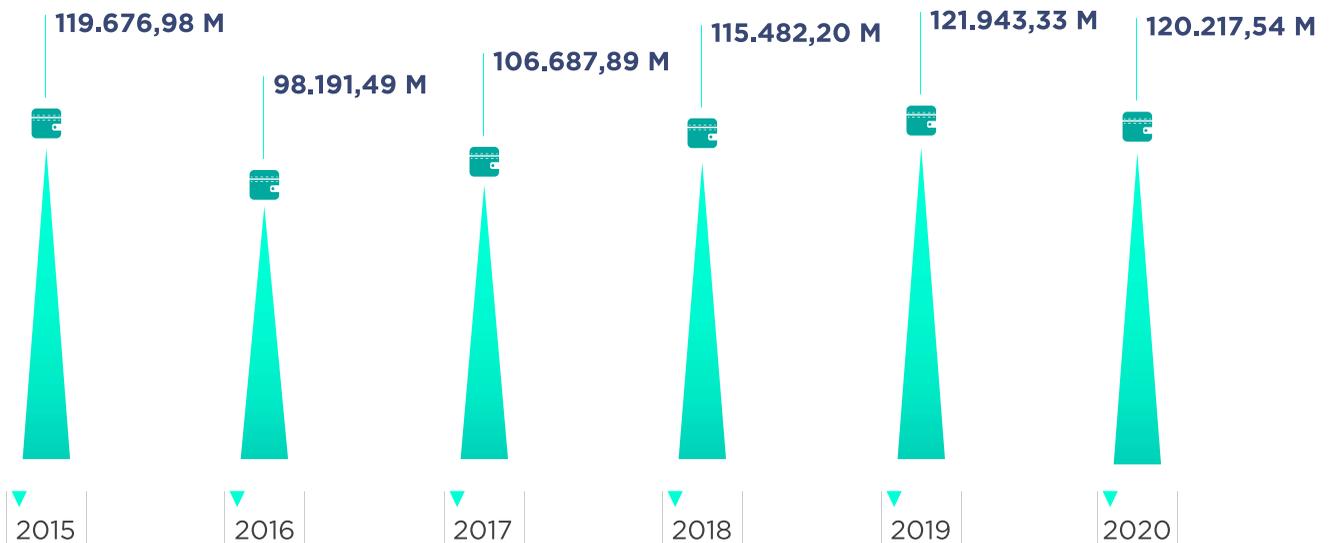
• • • • •
▶ APBN PUPR



APBN PUPR

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

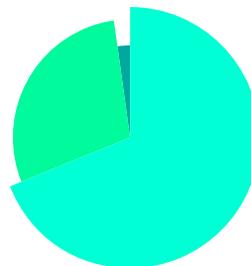
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2020 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 120.217,54 miliar rupiah. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.



Berdasarkan jenis belanja APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase terbesar pengalokasian APBN adalah belanja modal yaitu sebesar 69% atau senilai 82.757,70 miliar rupiah. Belanja barang memiliki persentase sebesar 29% atau senilai 34.468,06 miliar rupiah, dan sebesar 2% dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 2.991,77 miliar rupiah.

Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 dialokasi untuk 13 jenis program. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air yaitu senilai 43.692,7 miliar rupiah atau sebesar 36,34% dan tertinggi kedua dialokasikan untuk penyelenggaraan Jalan yaitu senilai 42..950,5 miliar rupiah atau sebesar 35,73%.

Alokasi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020

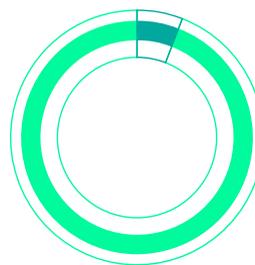


Belanja Modal
69%
82.757,70 M

Belanja Barang
29%
34.468,06 M

Belanja Pegawai
2%
2.991,77 M

Belanja Barang



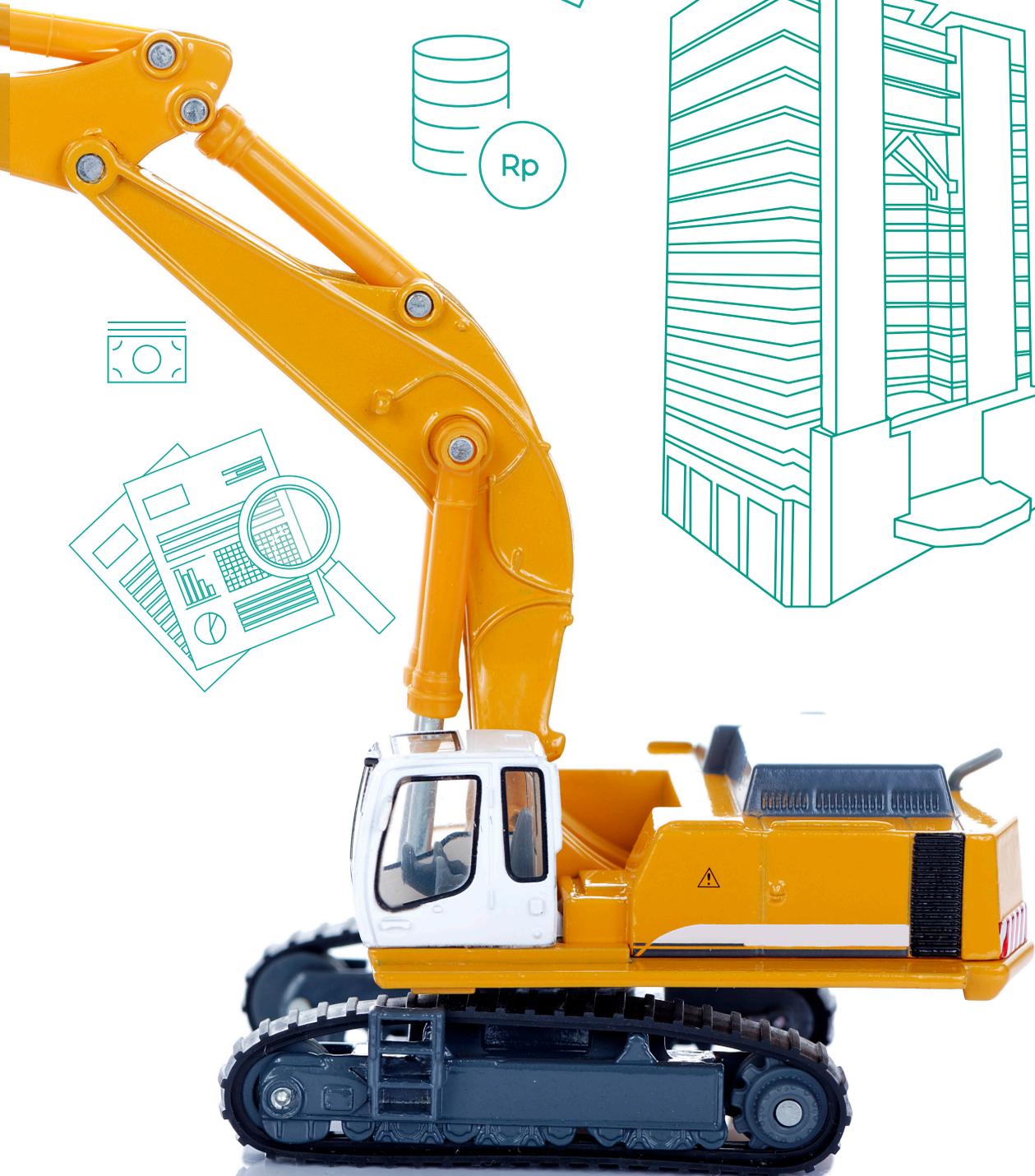
Barang Non Ops
94%
32.452,85 M

Barang Ops
6%
2.015,21 M

NO	PROGRAM	APBN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga Teknis Lainnya Kementerian PUPR	284.307.694
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	235.748.034
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	111.744.238
4	Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR	452.111.414
5	Program Pembinaan Konstruksi	725.509.410
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	22.009.951.244
7	Penyelenggaraan Jalan	42.950.464.107
8	Pengelolaan Sumber Daya Air	43.692.729.241
9	Program Pengembangan Perumahan	8.484.124.257
10	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	263.775.018
11	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	199.395.709
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia	525.188.892
13	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	282.486.694
TOTAL BELANJA		120.217.535.952

APBN PUPR

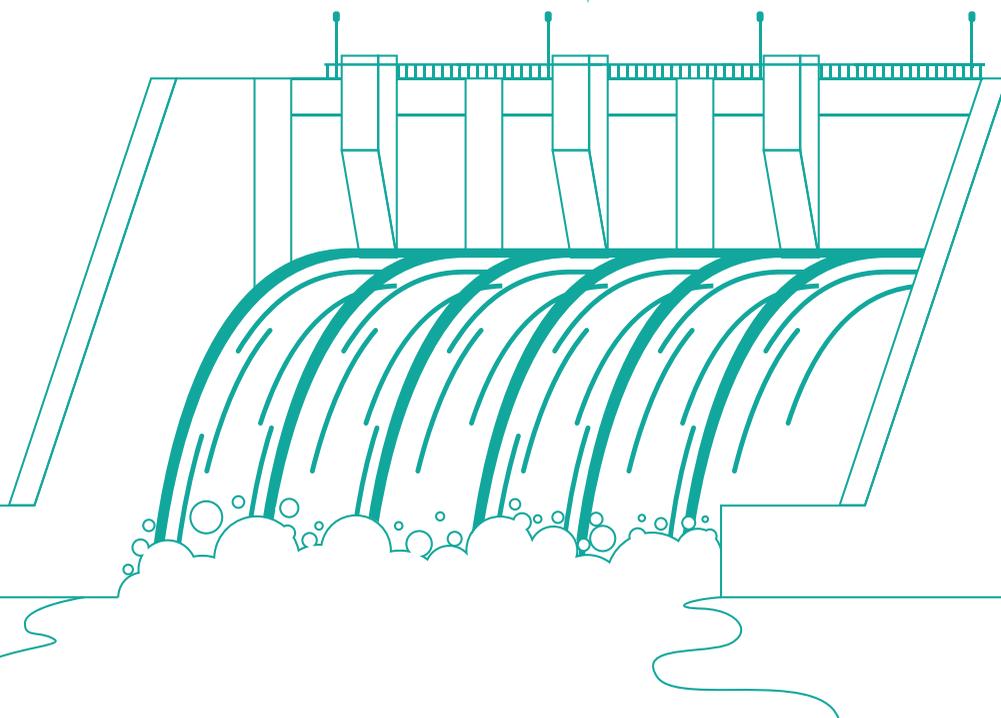






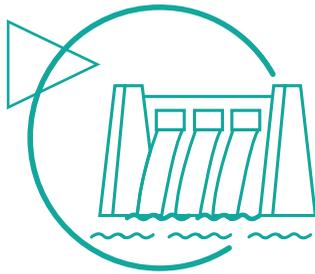
SUMBER DAYA AIR PUPR





CONTENT

- • • • •
- ▶ 205 Bendungan Eksisting
- ▶ Menatap Jauh Ketahanan Air Indonesia
- ▶ Sebaran Jumlah Danau, Situ, Embung Kolam Retensi



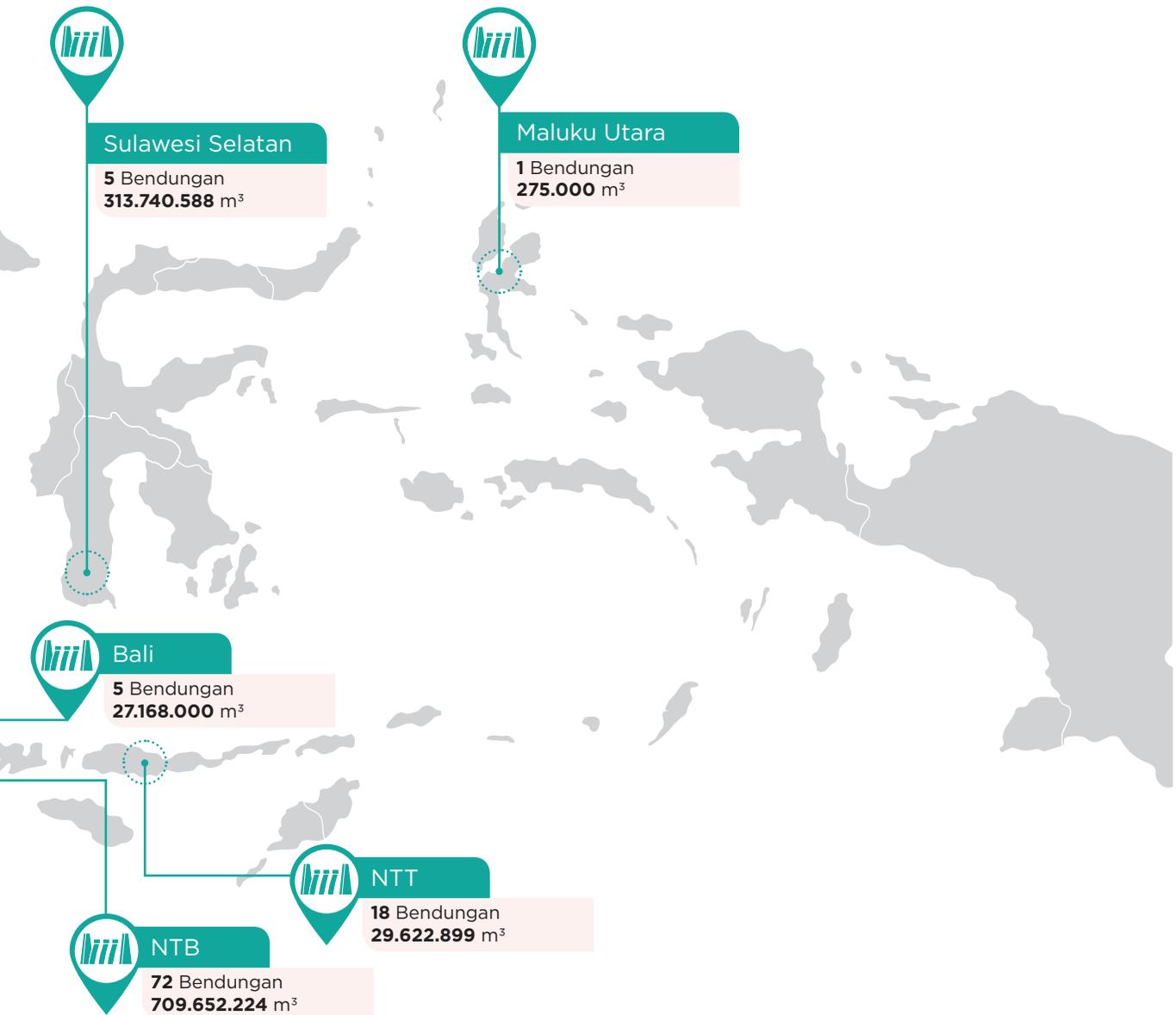
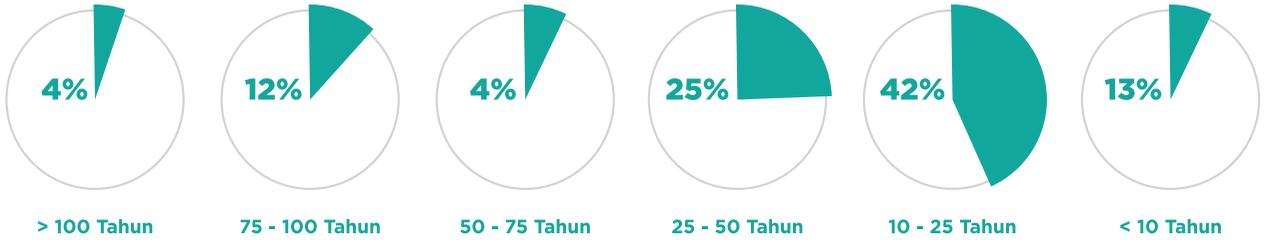
205 BENDUNGAN EKSISTING



Sumber Data :

- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Usia Bendungan

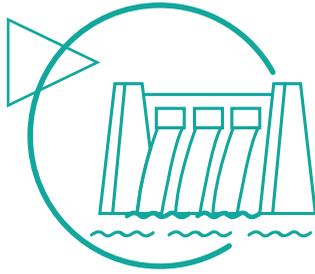


Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, yaitu bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur.

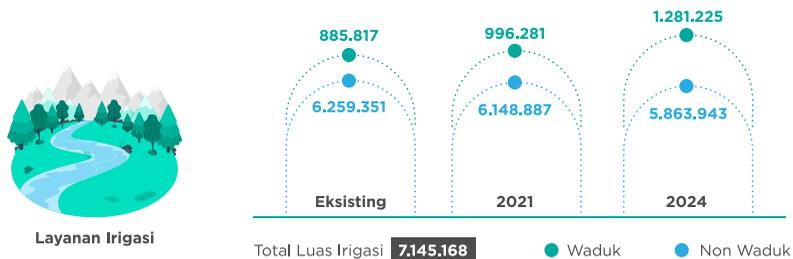
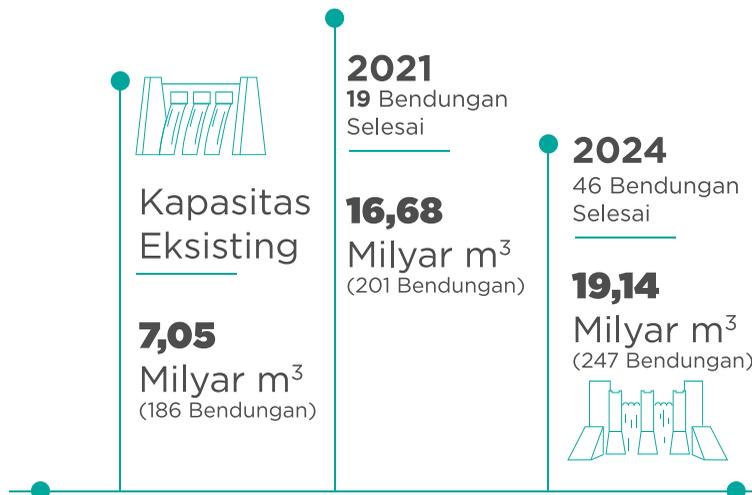
Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Manfaat pembangunan bendungan ada dua yaitu single purpose dam dan multi purpose dam. Single purpose dam merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. Multi purpose dam dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Hal penting dalam pemeliharaan bendungan adalah ketersediaan air, bendungan dibangun untuk membendung air sungai sebagai cadangan air. Penanggung jawab pembangunan serta pemeliharaan bendungan adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau badan usaha.







MENATAP JAUH KETAHANAN AIR INDONESIA



Layanan Air Baku



Layanan Listrik



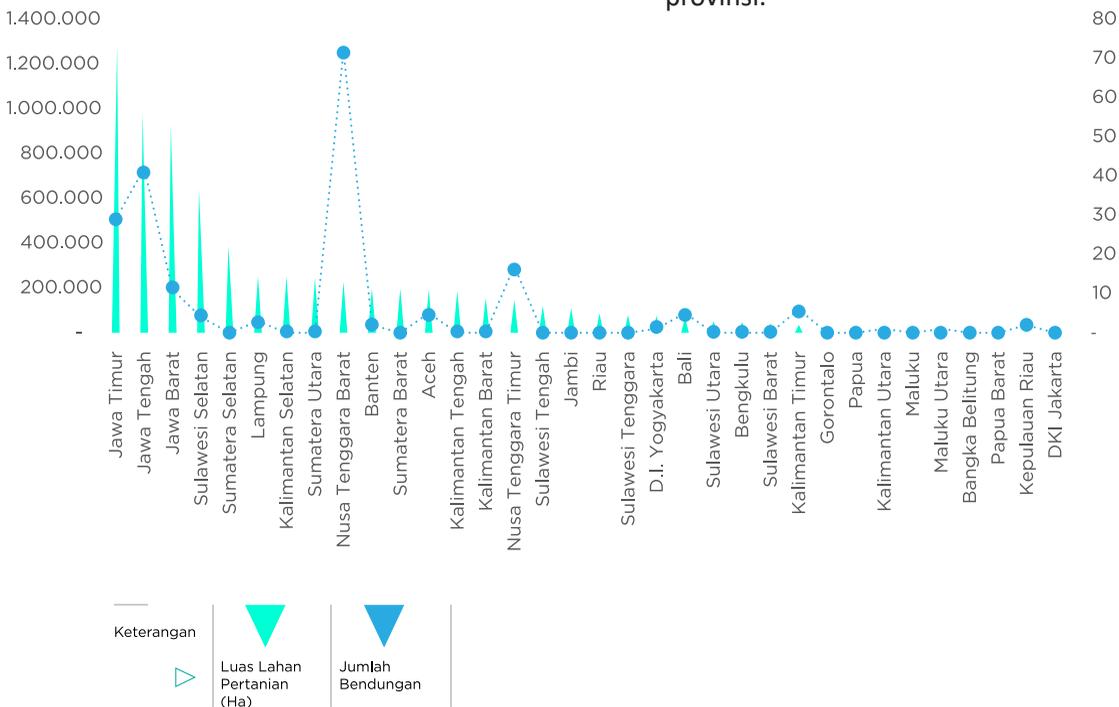
Ketersediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. Untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun 63 Bendungan pada 2014-2021 dan telah selesai 19 Bendungan pada tahun 2021.

Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Saat ini dari 7,1 juta Ha sawah, sebanyak 996.281 hektar sawah atau 14,02 persen dari irigasi yang sumber airnya berasal dari bendungan,

sementara sisanya masih berasal dari air non bendungan seperti tadah hujan maupun bendung saja.

Dengan selesainya 63 Bendungan tersebut, luasan sawah yang mendapat air dari bendungan bertambah 395.408 Ha atau secara total menjadi 1,28 juta Ha atau 18,03 persen yang bersumber dari air bendungan. Dengan sumber air dari bendungan, maka kebutuhan air pertanian diharapkan bisa terpenuhi sepanjang tahun.

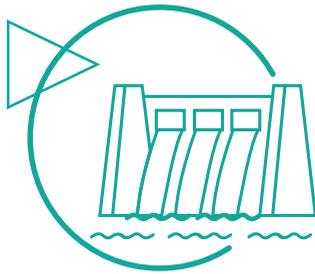
Berikut ini adalah grafik sebaran jumlah bendungan dan luasan areal sawah areal sawah pada tiap provinsi.



Dari Grafik tersebut dapat dilihat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah bendungan paling banyak, namun lahan pertaniannya tidak begitu luas. Banyak pembangunan bendungan di Provinsi ini dikarenakan Nusa Tenggara Barat merupakan daerah terkering di Indonesia, hanya mengalami musim hujan selama 3 bulan. Sehingga membutuhkan banyak tampungan air untuk mempertahankan ketersediaan air saat musim kemarau.

Status Data : Oktober 2021
Sumber Data :

- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Buku Statistik Lahan Pertanian



SEBARAN JUMLAH DANAU, SITU, EMBUNG DAN KOLAM RETENSI

3.462



TOTAL JUMLAH
EMBUNG

VOLUME TAMPUNGAN
233.608.494 M³

310



TOTAL JUMLAH
SITU

VOLUME TAMPUNGAN
1.257.941.431 M³

107



TOTAL JUMLAH
DANAU

VOLUME TAMPUNGAN
13.151.871.365 M³

12



TOTAL JUMLAH
KOLAM RETENSI

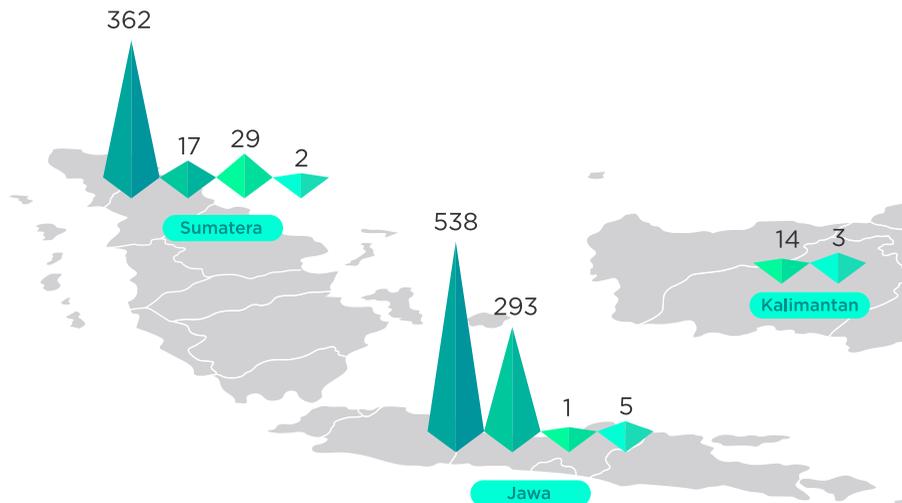
VOLUME TAMPUNGAN
3.787.464 M³

Jumlah Embung terbanyak berada di Pulau Bali Nusa Tenggara yaitu sebanyak 2.165 unit, hal ini dikarenakan pulau Nusa Tenggara memiliki musim panas yang panjang, sehingga membutuhkan banyak tampungan air agar ketahanan air di pulau tersebut tetap terjaga. Sedangkan pada Pulau Jawa memiliki jumlah embung terbanyak kedua yaitu 538 unit, namun situ di pulau tersebut memiliki jumlah terbanyak yaitu 293 unit.

Status Data : Oktober 2021

Sumber Data :

- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air





2.165

244

48

2

Sulawesi

76

2

Maluku

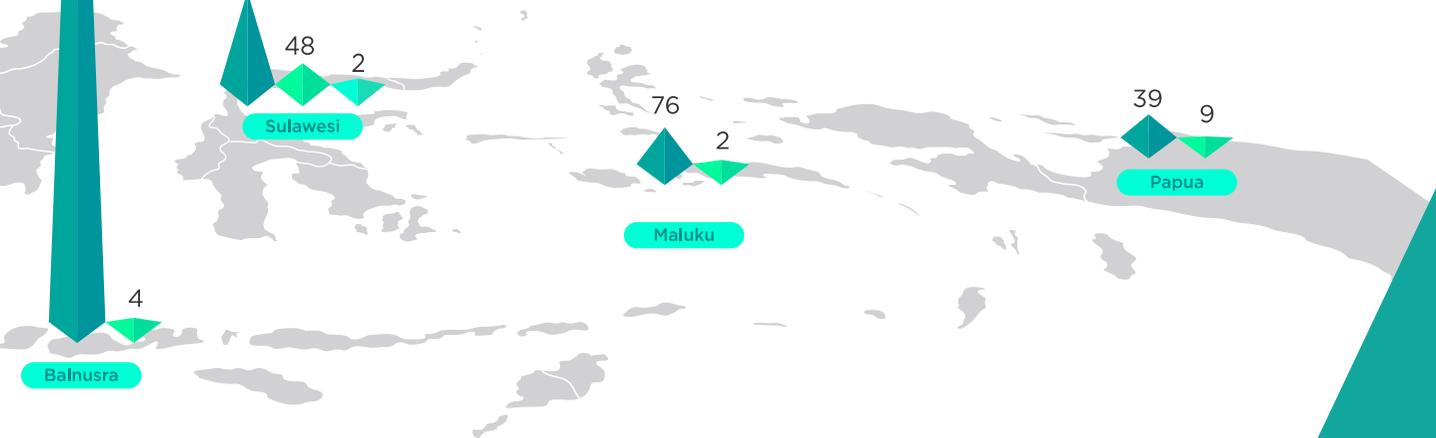
39

9

Papua

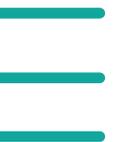
4

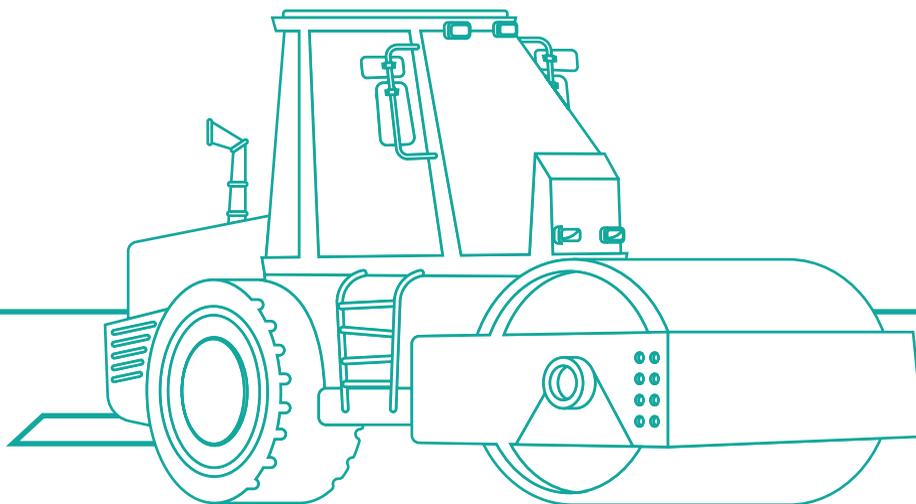
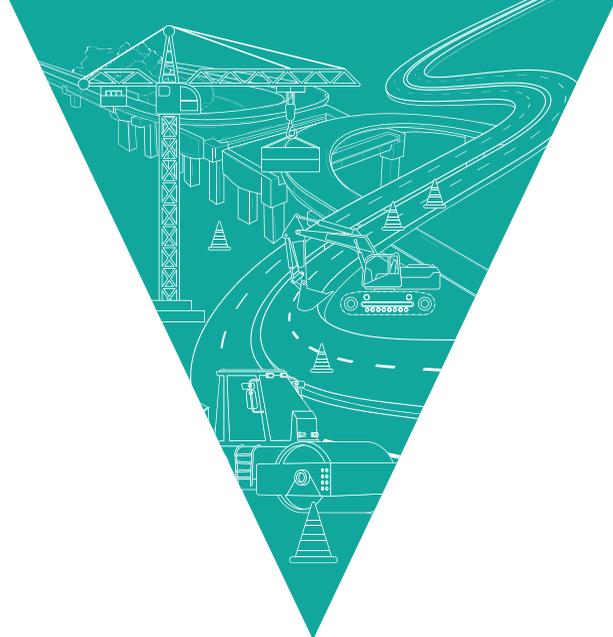
Balnusra





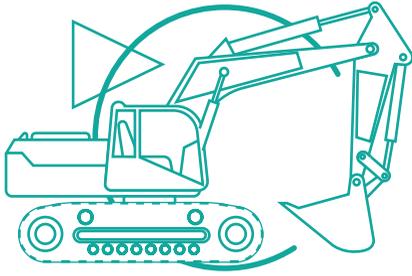
BINA MARGA PUPR





CONTENT

- ▶ Kemantapan Jalan Nasional
- ▶ Kemantapan Jalan Daerah
- ▶ Kemantapan Jalan untuk Pertumbuhan Ekonomi
- ▶ 2100 km Tol Indonesia
- ▶ Tol Dalam Pembangunan dan Perencanaan
- ▶ Kondisi Jembatan Indonesia



JALAN NASIONAL

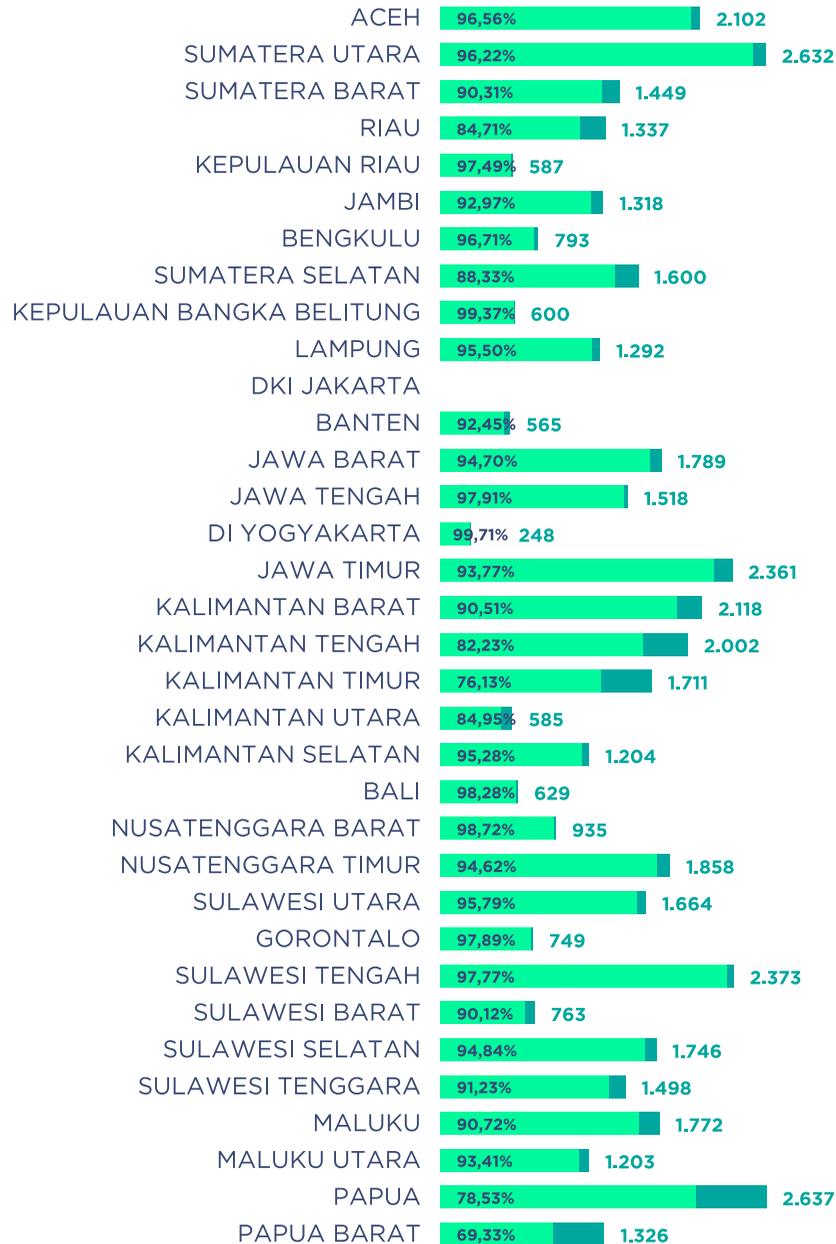
Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum dalam kondisi mantap dengan persentase 91,27%. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 99,71%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 69,33%. Jalan nasional Provinsi DKI Jakarta masuk kedalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.

▼ Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2020

91,27%





Sumber

Web service Bina Marga (status : 25 Agustus 2021)





Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis Indonesia.

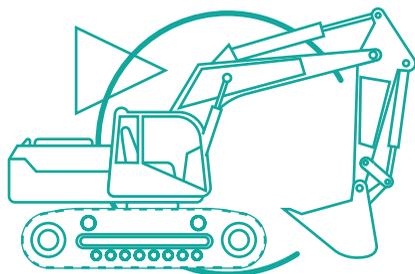
Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Studi menunjukkan, jika hendak memakmurkan rakyat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki jalur distribusi, dan jalur distribusi utama adalah jalan. Karena itu kualitas jalan adalah kualitas perekonomian bangsa. Berikut adalah analisis pengaruh kemandapan jalan nasional (Km) terhadap Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha) atas Dasar Harga Konstan



Berdasarkan data BPS (2011-2020) menunjukkan nilai PDB yang meningkat setiap tahunnya. Rata – rata kenaikan setiap tahun 5,33% atau sebesar sebesar 453.901,18 Milyar Rupiah. Pada setiap peningkatan disebabkan oleh 9,99% dari sektor konstruksi. Salah satu konstruksi yang paling berpengaruh adalah pembangunan jalan nasional. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian antar provinsi di Indonesia. Kualitas jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara maupun daerah untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya, mengembangkan industrinya, mendistribusikan populasi serta meningkatkan pendapatan.





JALAN TOL

Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih (mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Jalan tol merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tol.

Pembangunan jalan tol secara masif di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks daya saing nasional dan indeks performa biaya logistik nasional diantaranya melalui pembangunan infrastruktur jalan termasuk jalan tol.

Hingga tahun 2021 jumlah tol yang telah beroperasi sebesar 61 ruas dengan total panjang 2.378 km. Ruas jalan tol terpanjang adalah Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dengan panjang 189,4 km sedangkan tol layang terpanjang adalah Jakarta - Cikampek II Elevated (MBZ) dengan panjang 38 km.

Hingga saat ini pembangunan jalan tol masih terus dilakukan. Terdapat 30 Ruas Jalan tol dengan total panjang 1.908,54 km yang masih dalam proses konstruksi.





**Jumlah Ruas
Tol Operasi**

61 Ruas

Tol Terpanjang
Terbanggi Besar -
Pematang Panggang-
Kayu Agung
189,4 km



**Jumlah Panjang
Tol Operasi**

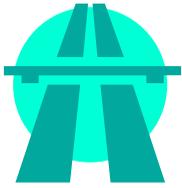
2.378 km

Tol Layang Terpanjang
Jakarta Cikampek II
Elevated (MBZ)
38 km

Sebaran Jalan Tol Operasi



Sumber
Web service Bina Marga (status : 25 Agustus 2021)



**Jumlah Ruas
Tol Konstruksi**

30 Ruas



**Jumlah Ruas
Tol Konstruksi**

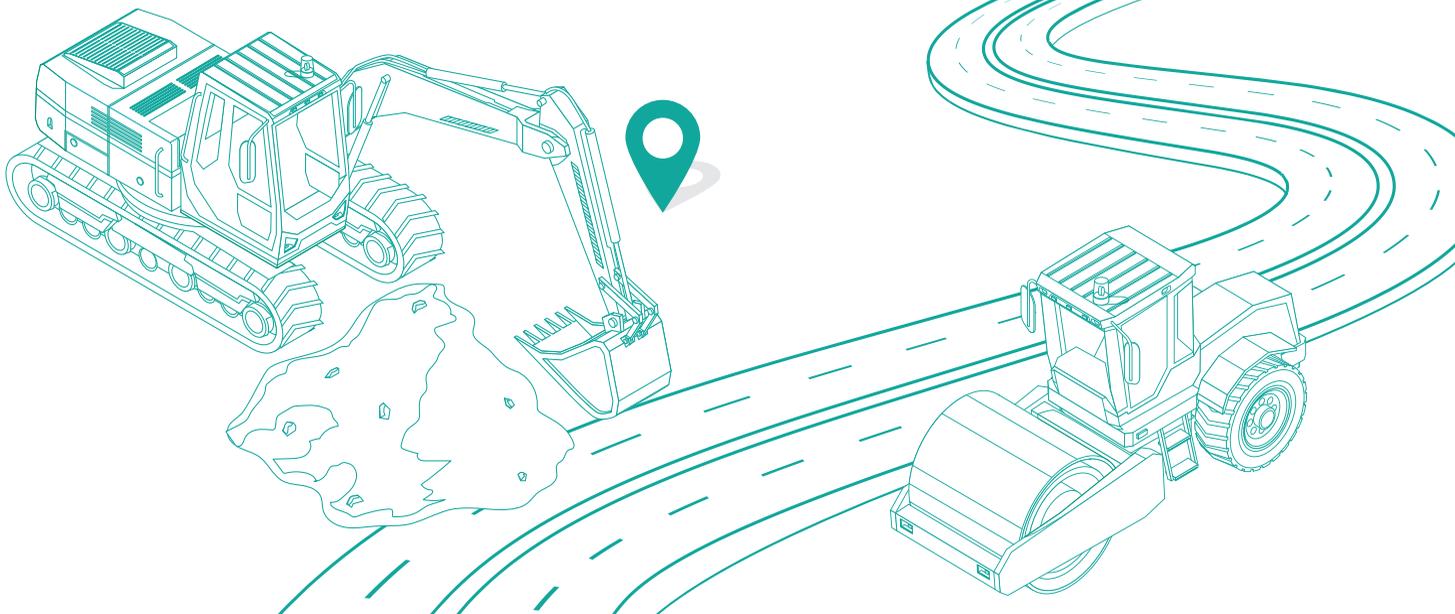
1.908,54 Km

Sebaran Jalan Tol Konstruksi



Sumber

Web service Bina Marga (status : 25 Agustus 2021)



Pertumbuhan jumlah jalan tol juga berbanding lurus dengan pertumbuhan rest area yang merupakan bagian penting dari keberadaan jalan tol. Apa itu rest area dan apa saja fungsinya?

Rest area adalah tempat beristirahat sebentar untuk melepaskan lelah selama perjalanan jarak jauh. Adanya rest area ini membuat pengguna jalan tol bisa sejenak istirahat atau mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Terdapat 91 Rest Area di Indonesia, berikut adalah sebaran rest area.

Rest Area

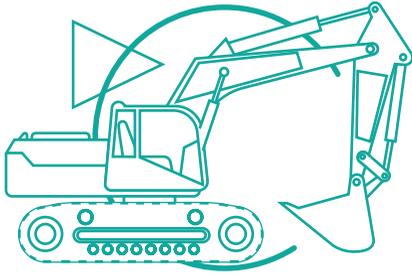
91 Jumlah Rest Area



Sumber

Web service Bina Marga (status : 25 Agustus 2021)

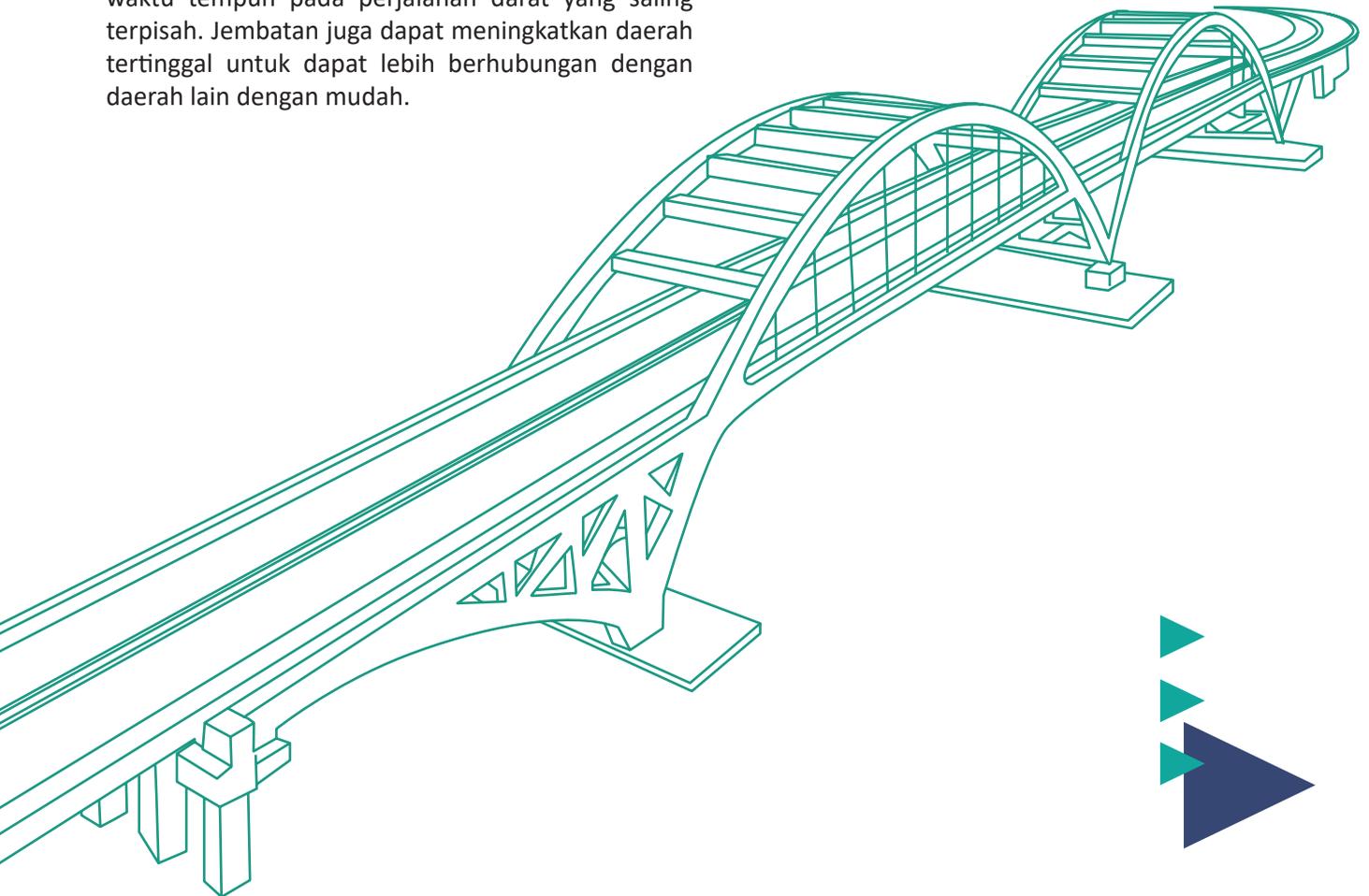




JEMBATAN

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat yang pisah karena kondisi geografis. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute/lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya. Dari segi perekonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi. Dan dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan juga dapat meningkatkan daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan daerah lain dengan mudah.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan jembatan, baik jembatan nasional, jembatan gantung maupun jembatan khusus. Hingga tahun 2021 terdapat 19.135 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 539.477 m, 201 unit Jembatan Gantung dengan total panjang 14.424 m dan 100 unit Jembatan Khusus dengan total panjang 20.246 m.





Jumlah
Jembatan Nasional

19.135 unit



Total Panjang
Jembatan Nasional

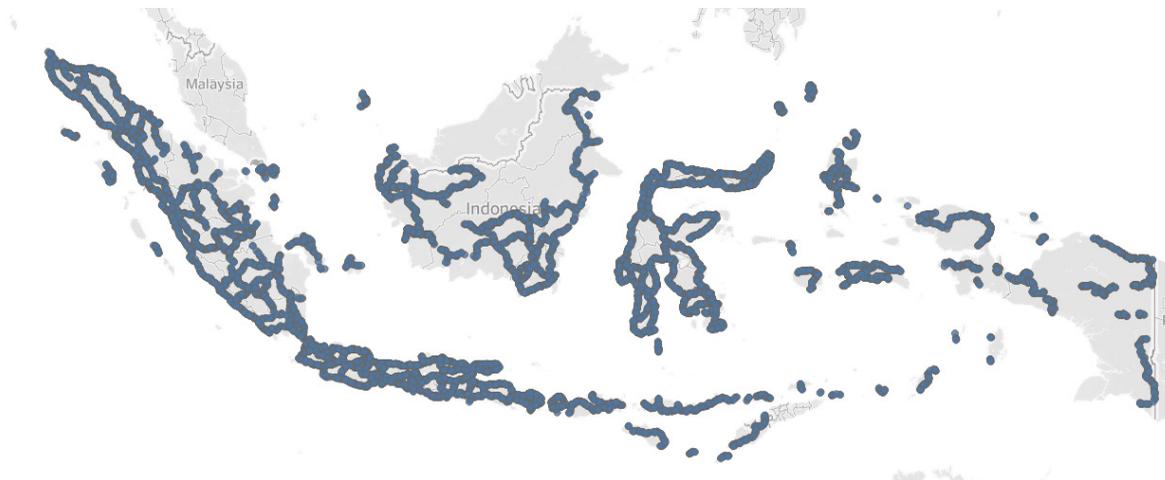
539.477 m



Jembatan Nasional
Terpanjang

Suramadu
5.438 km

Sebaran Jembatan Nasional





**Jumlah
Jembatan Gantung**

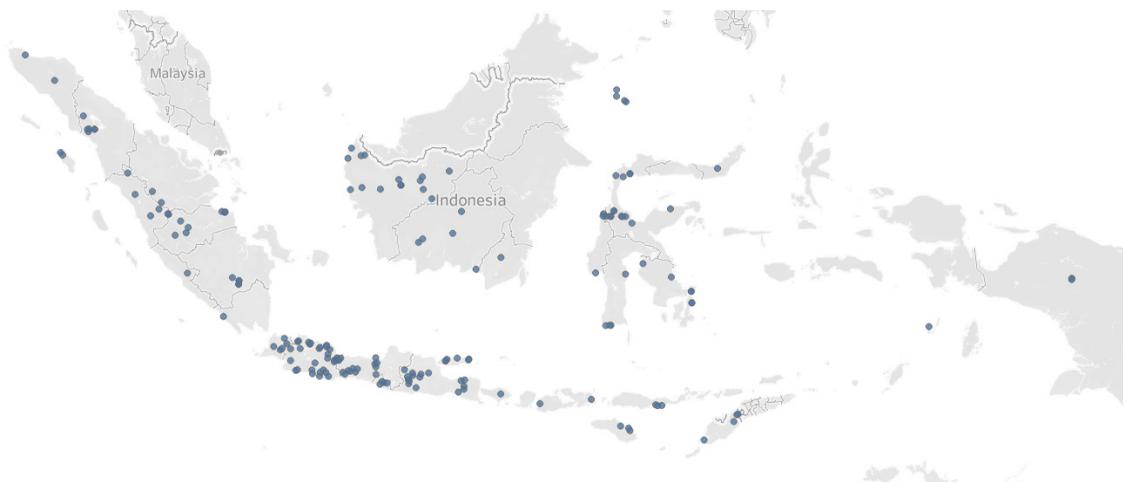
201 unit



**Total Panjang
Jembatan Gantung**

14.424 m

Sebaran Jembatan Gantung



Sebaran Jembatan Khusus



Jumlah
Jembatan Khusus

48 Unit



Total Panjang
Jembatan Khusus

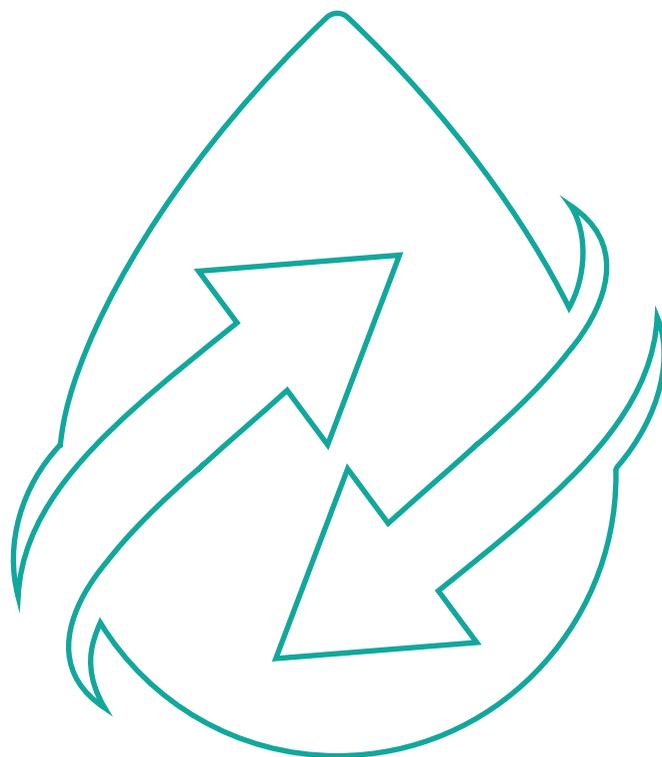
28.887 m





CIPTA KARYA PUPR





CONTENT

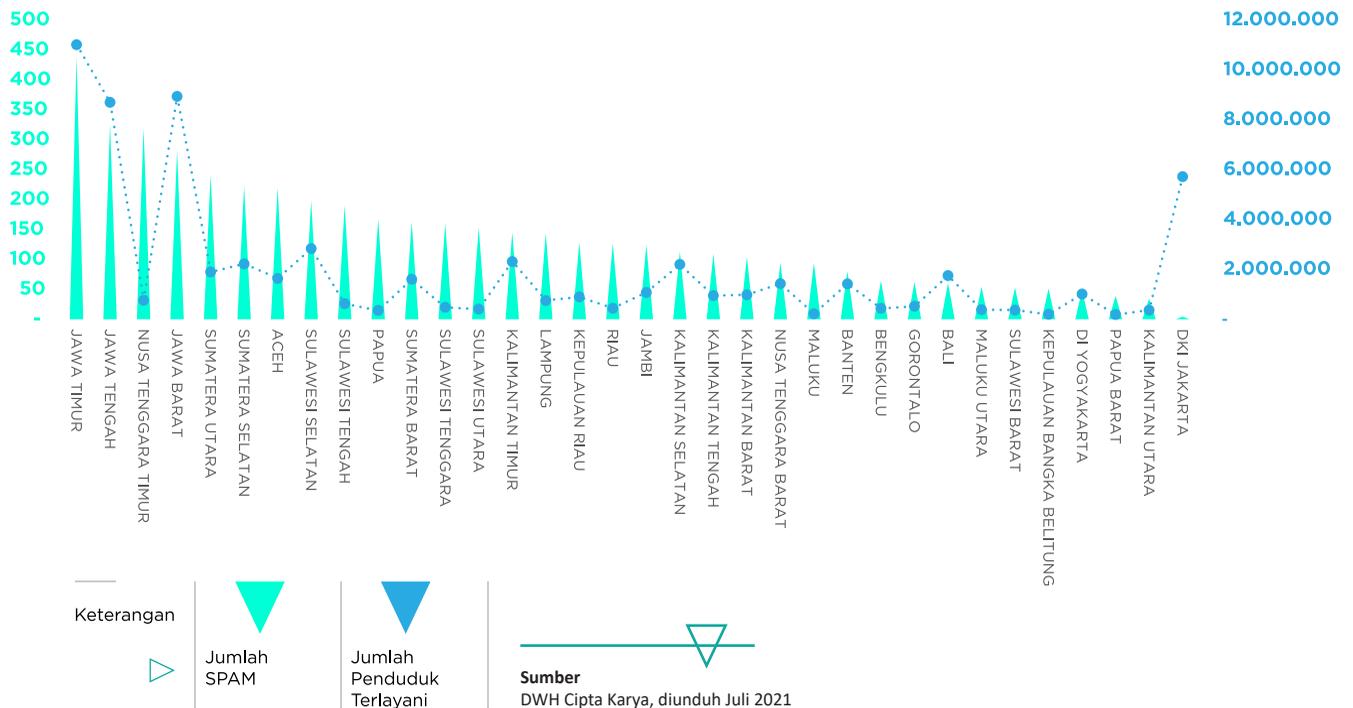
- ▶ Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ▶ Instalasi Pengolahan Air Limbah
- ▶ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
- ▶ Tempat Pembuangan Akhir
- ▶ Pengembangan Kawasan Permukiman

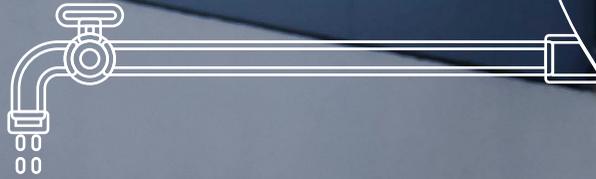


PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

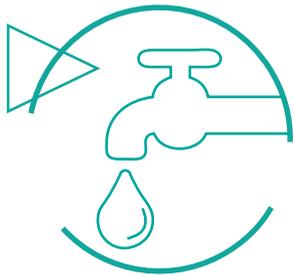
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Berikut adalah statistik sistem penyediaan air minum dan Jumlah Penduduk yang terlayani.





Total SPAM yang telah dibangun sebanyak 4.809 unit dengan jumlah penduduk yang telah terlayani sebanyak 64.901.055 jiwa. Jumlah SPAM terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 438 unit dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 11.007.069 jiwa. Provinsi yang perlu ditingkatkan sistem penyediaan air minumannya adalah Provinsi DKI Jakarta karena jumlah SPAM sangat rendah dan jumlah penduduk yang terlayani relatif tinggi.



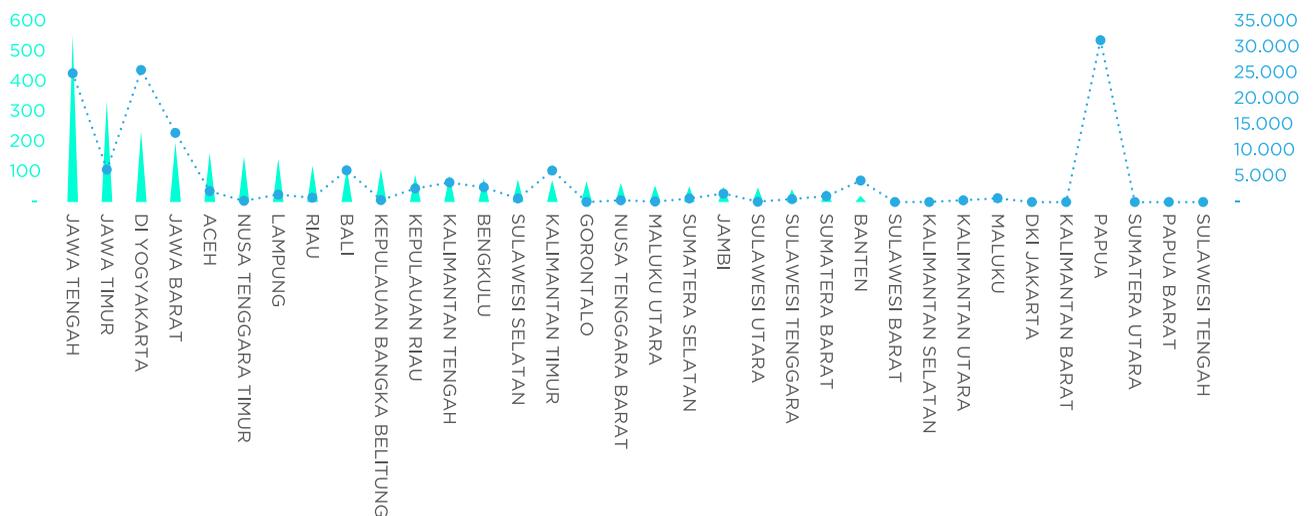


INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Lingkungan layak huni adalah lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yang sering muncul di antaranya berkaitan dengan pembuangan limbah. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baik limbah air, udara, maupun tanah. Limbah yang tidak melalui proses pengolahan akan merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak tanah.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/kawasan (on site) dan sistem terpusat (off site).

Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar. Oleh sebab itu, dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal. Berikut adalah statistik jumlah Pelanggan IPAL dan skala permukiman IPAL. Jumlah Pelanggan IPAL di Indonesia sebanyak 138.519 sambungan rumah. Provinsi Jawa Barat mengakomodir pelanggan sebanyak 24.941 sambungan rumah dengan skala permukiman 554 KK. Provinsi Papua memiliki jumlah pelanggan terbanyak sebesar 31.348 sambungan rumah, akan tetapi skala permukiman sangat rendah.



Keterangan



Skala Permukiman (KK)

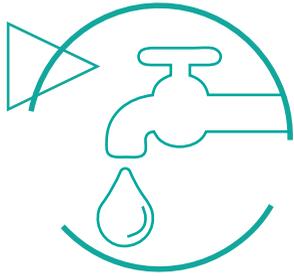
Jumlah Pelanggan (SR)

Sumber

DWH Cipta Karya, diunduh Juli 2021



Provinsi	Nama IPAL
Sumatera Utara	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 12
Sumatera Utara	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 10 dan 11
Riau	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 1
Riau	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 2
Kepulauan Bangka Belitung	Sanitasi KSPN Tanjung Kelayang
DKI Jakarta	Sanitasi KSPN Kepulauan Seribu
DKI Jakarta	Sanitasi Kawasan Istana Kepresidenan Jakarta
DKI Jakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Semper Barat
Jawa Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Cimanggis
Jawa Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Pondok Pesantren Cipasung
D.I. Yogyakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sewon
D.I. Yogyakarta	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Berbah
Banten	Sanitasi KSPN Tanjung Lesung
Bali	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sesehan dan Sekitarnya
Nusa Tenggara Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Gili Trawangan
Nusa Tenggara Timur	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tambolaka
Kalimantan Tengah	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Sukamara
Sulawesi Tenggara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tomia
Maluku	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Desa Neniari
Maluku Utara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Kepulauan Sula
Papua Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Teluk Wondama



INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, yaitu kedap air. Tangki septik yang dimiliki masyarakat saat ini perlu dilakukan pemeliharaan/penyedotan dalam 2-3 tahun, apabila tidak maka dapat mencemari air tanah.

IPLT yang telah terbangun hingga saat ini sebanyak 80 unit. Jumlah IPLT terbanyak berada di Provinsi Aceh sebanyak 14 unit sedangkan terdapat beberapa provinsi yang belum memiliki IPLT, diantaranya adalah Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua.



Keterangan

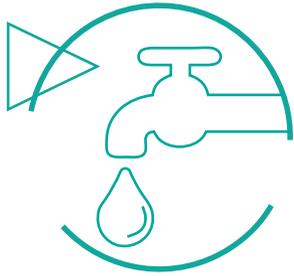


Jumlah
IPLT

Sumber

DWH Cipta Karya, diunduh Juli 2021





..... TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah yang dikelola yaitu, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tercipta lingkungan hidup yang sehat, sekaligus memperoleh manfaat yang mungkin masih bisa diperoleh dari keberadaannya.

Pengelolaan sampah telah diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2008. Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Penyediaan TPA di kota-kota besar menghadapi kendala keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pengelolaan TPA secara regional menjadi lebih dibutuhkan.

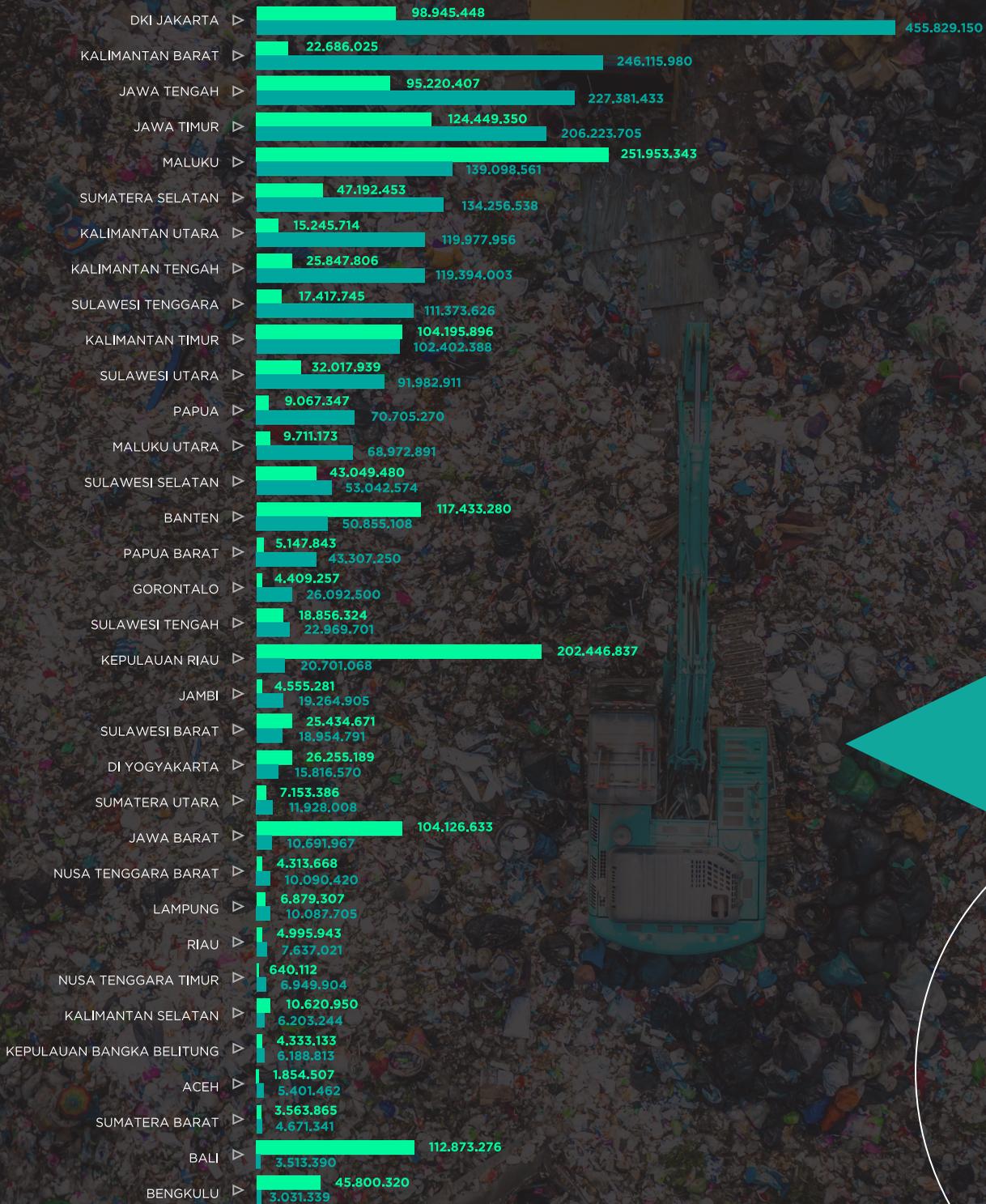
2.451.113.493

1.608.693.908

Keterangan

Kapasitas
TPA
(M³/Tahun)

Sampah
Masuk
dalam
TPA
(M³/Tahun)



Keterangan

▼
Sampah
Masuk
dalam
TPA
(M³/Tahun)

▼
Kapasitas
TPA
(M³/Tahun)

Sumber

DWH Cipta Karya, diunduh Juli 2021



..... PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sesuai dengan agenda Nawacita yang diusung oleh Pemerintah, terdapat 2 poin yang berkaitan dengan pengembangan permukiman. Pertama yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Agenda tersebut diwujudkan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan pedesaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada permukiman kumuh, pelayanan air minum, pelayanan sanitasi, keselamatan bangunan dan gedung, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.

Permukiman layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, dengan tujuan meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan tujuan mengurangi luasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.





a. Kawasan Permukiman Perkotaan

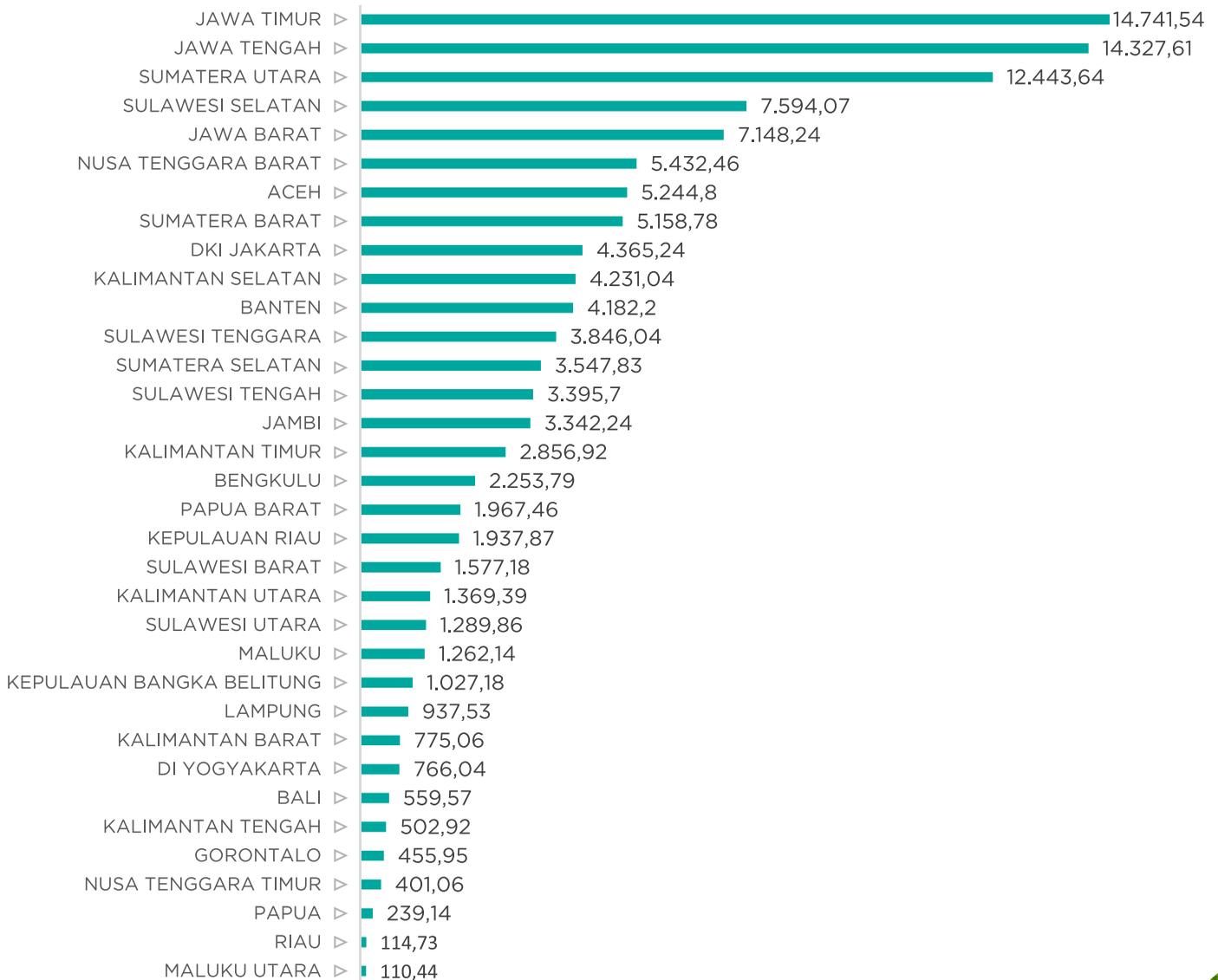
Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga menyebabkan rendahnya kualitas permukiman dan kehidupan penghuninya. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk ini tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu tumbuhnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh. Selain itu, penanganan kawasan kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan SK Bupati/Walikota tentang permukiman kumuh sebagai acuan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh.

Terdapat 7 kriteria dalam lingkup keciptakarya yang menjadi indikator dikatakan kumuh atau tidaknya suatu permukiman, yaitu pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan, pelayanan pengolahan air kotor, drainase dan pengendalian banjir, pemadam kebakaran, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, dan penanggulangan bencana. Kriteria tersebut bersama dengan beberapa kriteria dari aspek lainnya menjadi bagian dari kriteria kota layak huni.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta **Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016** tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dijelaskan mengenai pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan permukiman kumuh. Pencegahan dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan kesesuaian perizinan, standar teknis, dan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dengan penetapan lokasi kumuh dan dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Kemudian pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah kota-kota yang menjadi prioritas untuk mendapat penanganan permukiman kumuh perkotaan dari Kementerian PUPR.





Keterangan



Luas
Kawasan
Kumuh
Perkotaan



Sumber

DWH Cipta Karya, diunduh Juli 2021





b. Kawasan Permukiman Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang.

Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang

diperlukan. Infrastruktur yang terdapat di PLBN meliputi gedung PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, bangunan check point, koridor pejalan kaki, klinik, wisma Indonesia, tempat ibadah, mess karyawan, dan lain-lain. Sementara pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan meliputi penyediaan jaringan transportasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, serta persampahan. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan adanya peningkatan ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan; tercipta kelembagaan lintas batas negara yang terpadu; serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga. Pembangunan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Selain pembangunan PLBN, dilakukan pula Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di 9 kawasan, yaitu Entikong, Nanga Badau, Aruk, Mota'ain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Apari.



Pos Lintas Batas Negara

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
Sei Kelik	Sintang	Kalimantan Barat
Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
Long Midang/Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
Sei Pancang Sebatik	Nunukan	Kalimantan Utara
Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
Oepoli	Kupang	Nusa Tenggara Timur
Napan	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Yetetkun	Boven Digoel	Papua
Sota	Merauke	Papua

Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
Mota'ain	Belu	Nusa Tenggara Timur
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Skouw	Jayapura	Papua
Sebatik Tengah	Nunukan	Kalimantan Utara
Long Apari	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur





PERUMAHAN PUPR





CONTENT

- • • • •
- ▶ Rumah Susun
- ▶ Rumah Khusus
- ▶ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



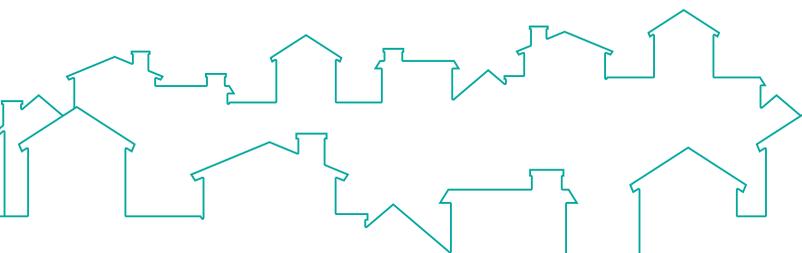
PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula, penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

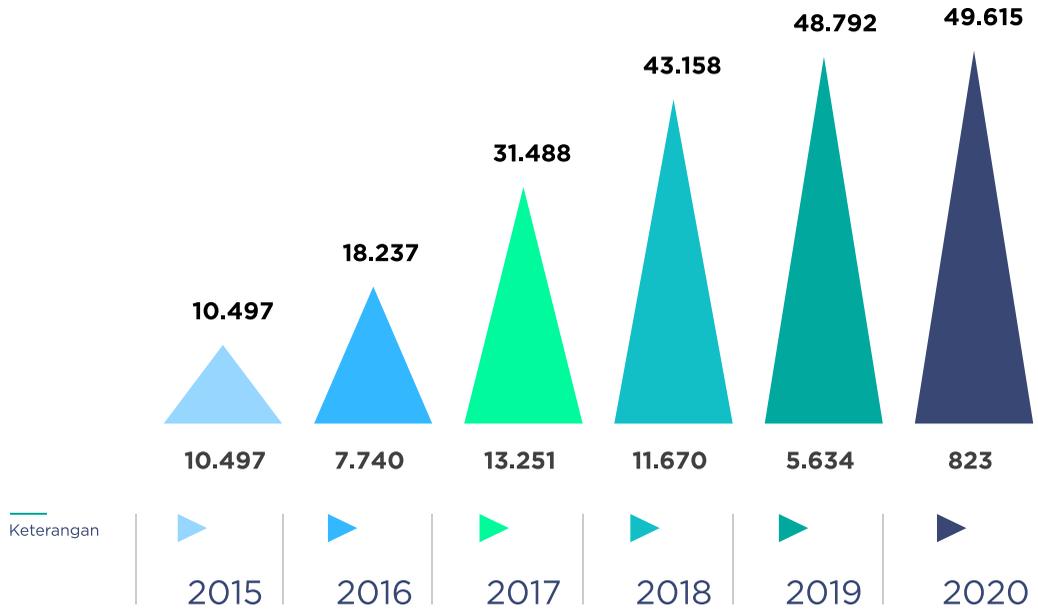
Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR selaku penanggung jawab penyelenggaraan perumahan meluncurkan beberapa program bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulan rumah swadaya (peningkatan kualitas dan pembangunan baru).

1. Rumah Susun

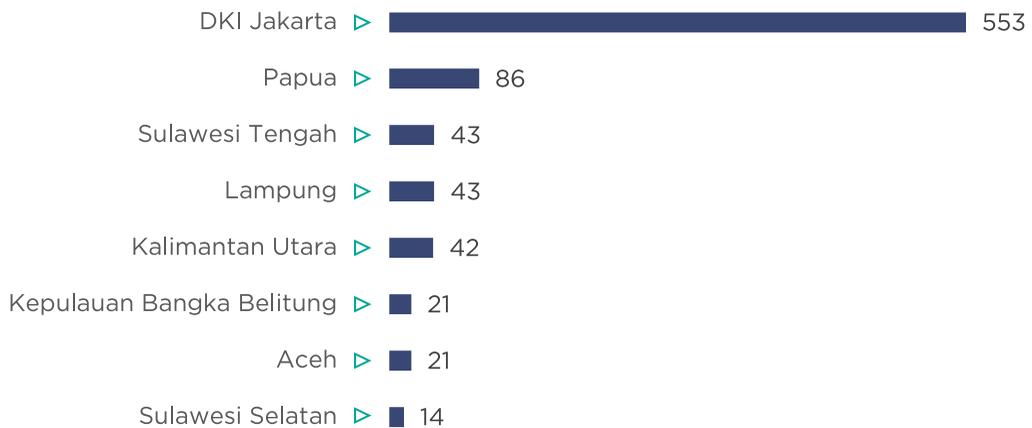
Pembangunan Rumah Susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan Rumah Susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega. Berikut adalah statistik rumah susun yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR beserta komposisi penerima manfaat rumah susun.



Jumlah Rumah Susun Tahun 2015-2020 (unit)



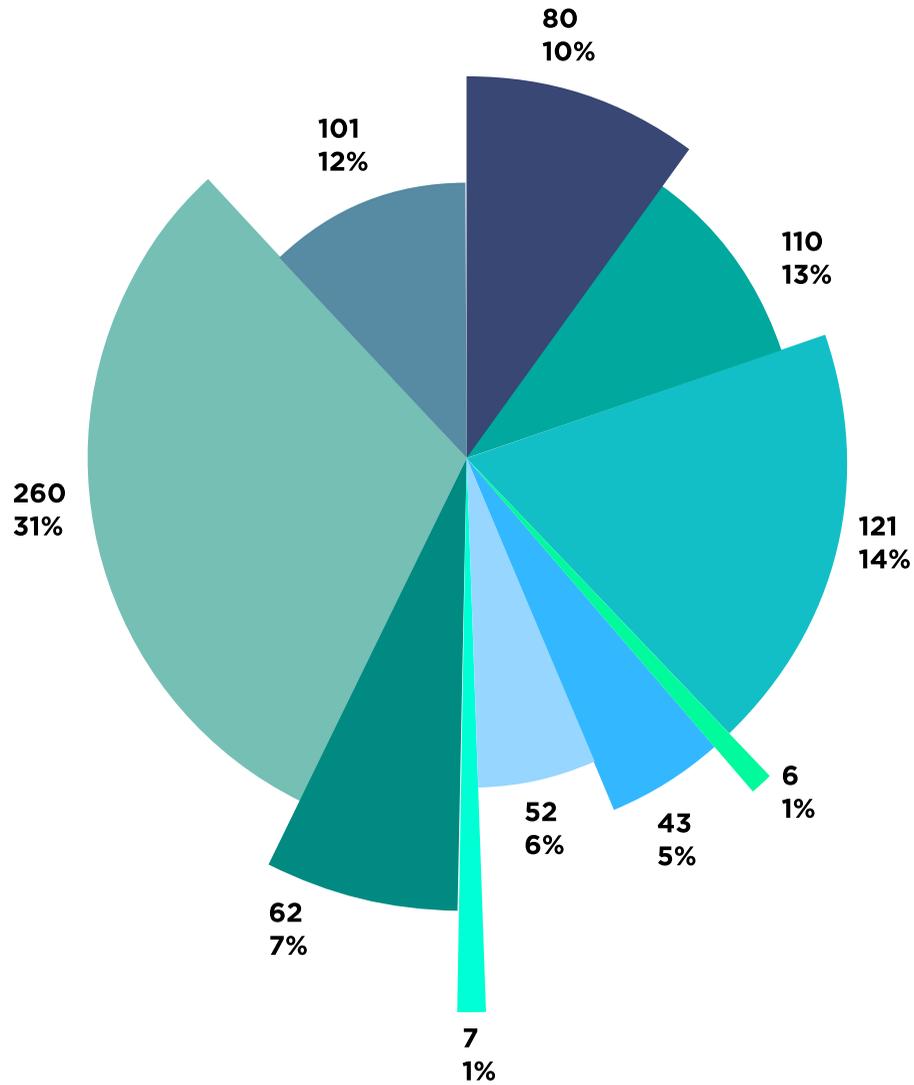
Keterangan



Keterangan

Sebaran Rumah Susun Tahun 2020





Keterangan



ASN



MAHASISWA



MBR



NELAYAN



PEKERJA

PERGURUAN
TINGGI

PNS



POLRI

PONDOK
PESANTREN

TNI

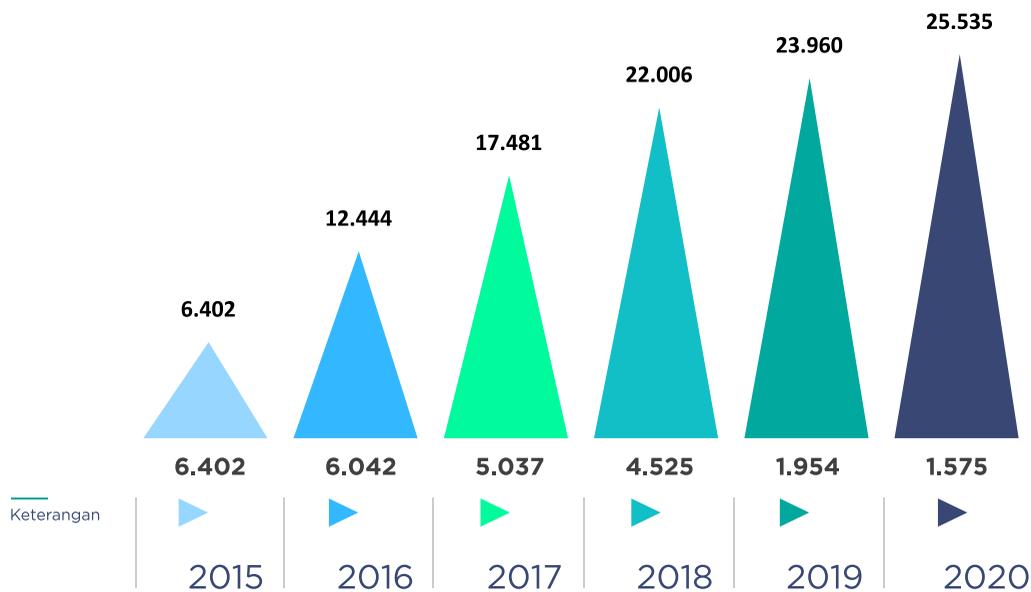
Sumber

Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Status Data
 Desember 2020

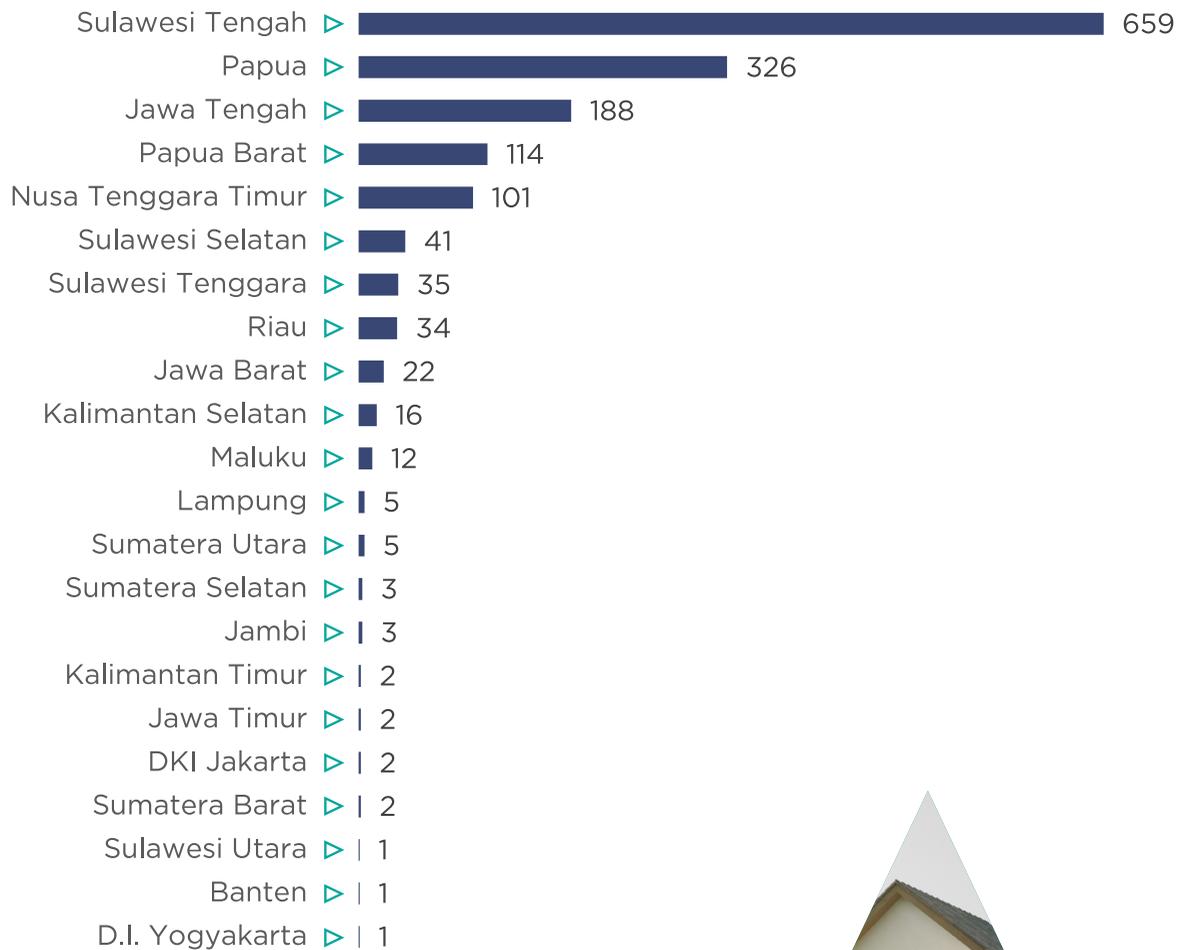
2. Rumah Khusus

Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah peruntukan pembangunan rumah tersebut, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, Polri, TNI, dan lainnya. Berikut adalah statistik rumah khusus yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR beserta komposisi penerima manfaat rumah khusus.

▶ Jumlah Rumah Khusus Tahun 2015-2020 (unit)



Sebaran Rumah Khusus Tahun 2020



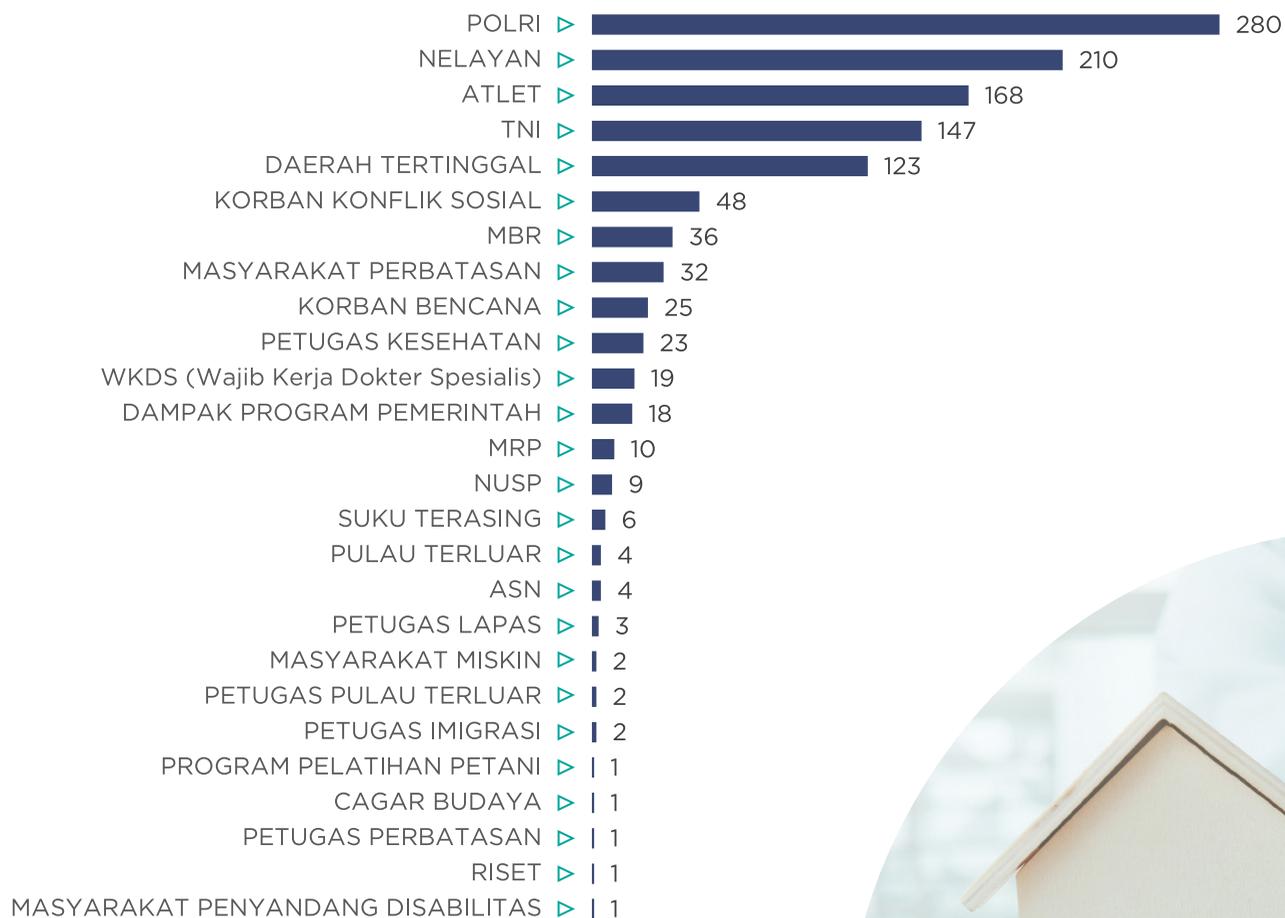
Keterangan



Sebaran
Rumah
Khusus
Tahun 2020



Penerima Manfaat Rumah Khusus



Keterangan

Sebaran
Rumah
Khusus
Tahun 2020

Sumber

Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Status Data

Desember 2020



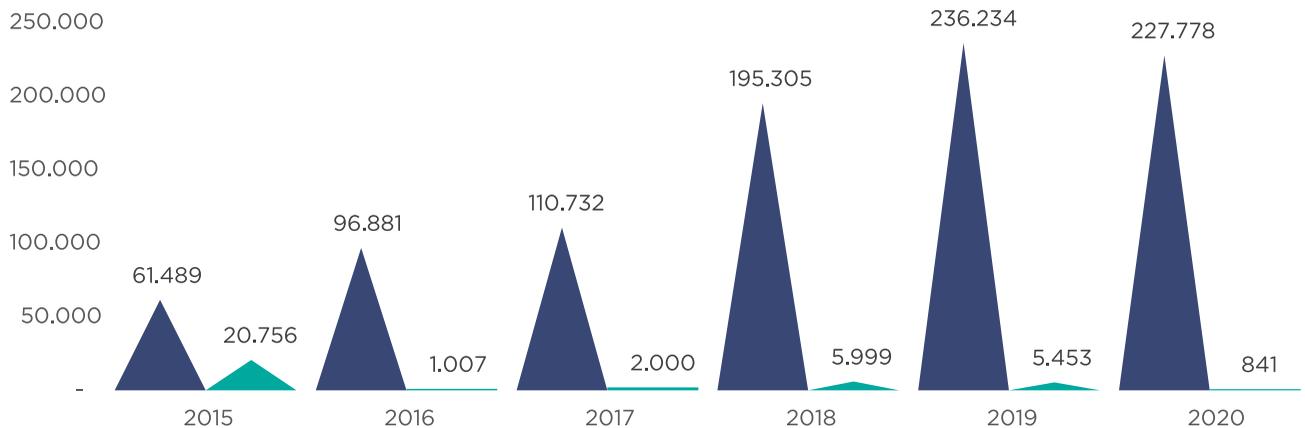
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni seperti sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. BSPS diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran BSPS adalah rumah tidak layak huni yang merupakan tanah milik sendiri, bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat atau terkena konsolidasi tanah, relokasi dalam rangka peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, rumah yang terkena bencana, kerusakan sosial atau kebakaran. Kategori rumah tidak layak huni yang menjadi target kegiatan BSPS adalah sebagai berikut:

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV,
2. Bahan dinding berupa bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV,
3. Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh,
5. Rusak berat dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi

Berikut adalah realisasi BSPS tahun 2015-2020 beserta sebaran BSPS di Indonesia.

Realisasi BSPS Tahun 2015-2020



Keterangan

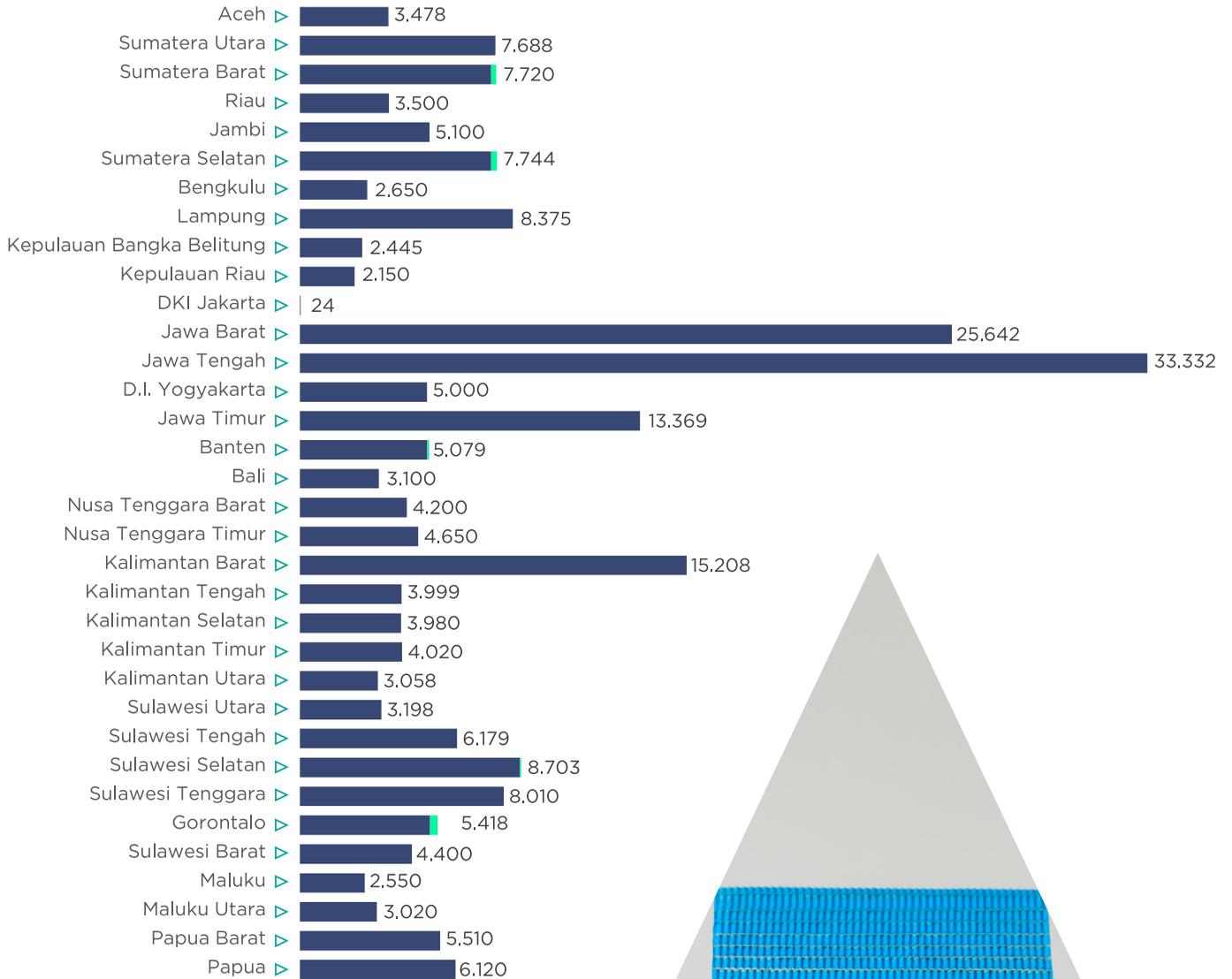


Peningkatan
Kualitas



Pembangunan
Baru

Sebaran Realisasi BSPS Tahun 2020



Keterangan

- ▼ Peningkatan Kualitas
- ▼ Pembangunan Baru

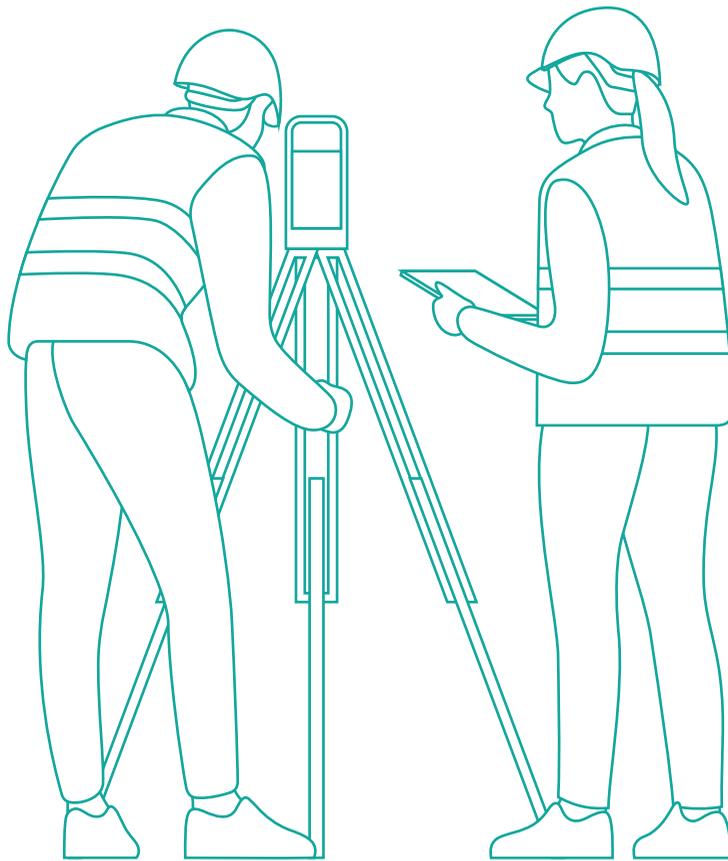
Sumber
Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Status Data
Desember 2020





BINA KONSTRUKSI PUPR





CONTENT

- • • • •
- ▶ Badan Usaha Jasa Konstruksi
- ▶ Tenaga Kerja Konstruksi



.....
SDM

KONSTRUKSI

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan yang menyatu dengan lahan kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain, gedung, jalan, jembatan, bangunan air dan drainase, sanitasi, dan lainnya. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS tahun 2015, kegiatan konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Konstruksi Gedung meliputi semua jenis gedung/ bangunan, baik pembangunan gedung baru, perbaikan, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prefabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara.
2. Konstruksi Bangunan Sipil mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga umum dan lain-lain.
3. Konstruksi Khusus merupakan kegiatan konstruksi yang dilakukan dengan keahlian khusus. Kegiatan konstruksi khusus mencakup penyelesaian gedung, instalasi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan, sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan, dan lainnya.







..... BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

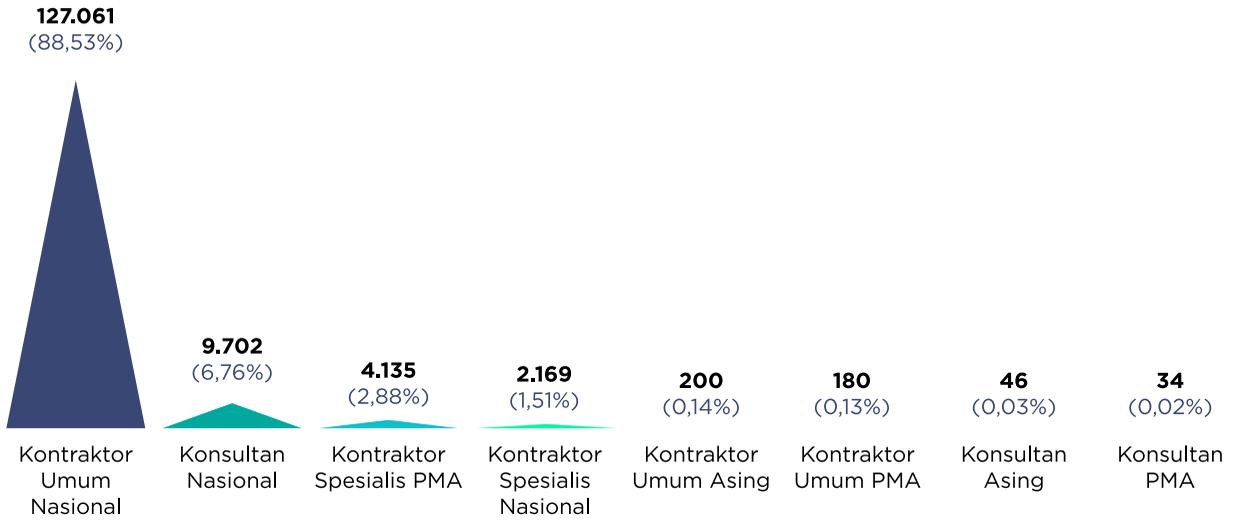
Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik perseorangan atau badan usaha. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Usaha jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis.

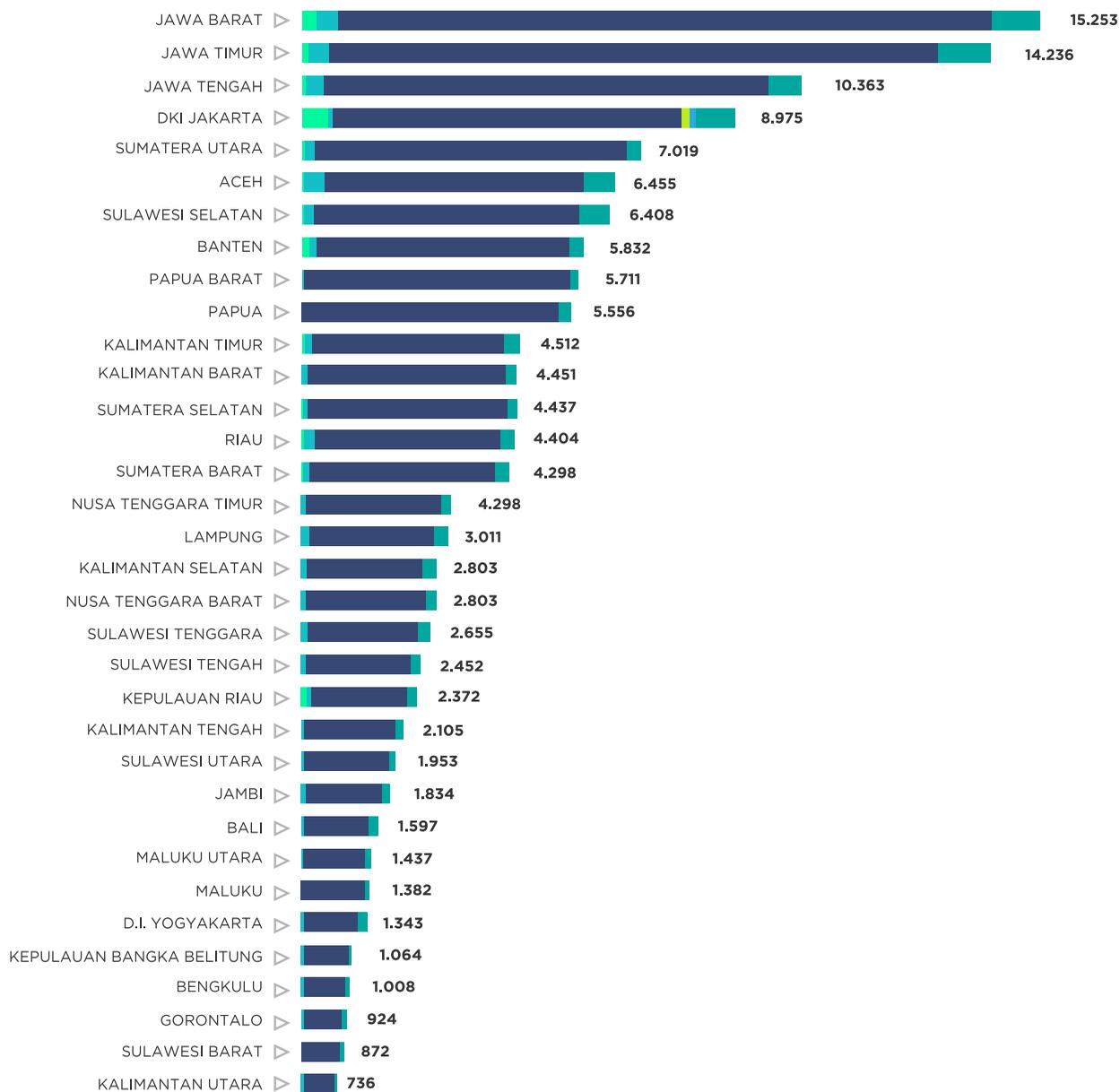
Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. 88,53% Badan usaha jasa konstruksi adalah kontraktor umum nasional. Jumlah badan usaha jasa konstruksi terbanyak berada di Jawa Barat sebesar 15.253 yang terdiri dari 89% kontraktor umum nasional.



Badan Usaha Jasa Konstruksi



Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi



Keterangan



Kontraktor
Spesialis
Nasional



Kontraktor
Spesialis
PMA



Kontraktor
Umum
Nasional



Kontraktor
Umum
PMA



Kontraktor
Umum
Asing



Konsultan
PMA



Konsultan
Asing



Konsultan
Nasional



TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.

Kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut:

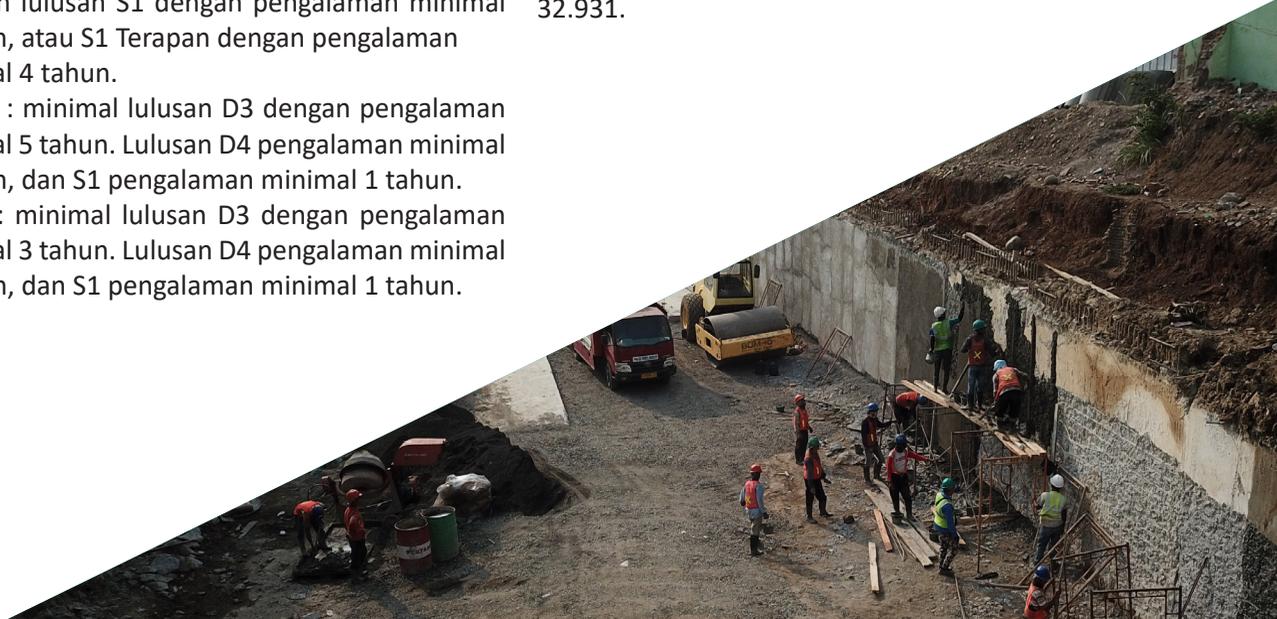
- a. Utama : minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.
- b. Madya : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.
- c. Muda : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.

1. TENAGA AHLI KONSTRUKSI

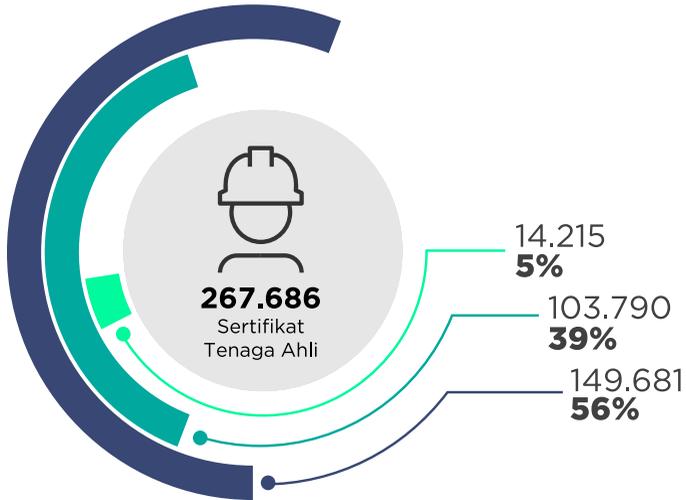
Tenaga ahli bersertifikat keahlian merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi SBU bidang jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3), dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Berdasarkan informasi dari sumber data, terdapat 267.686 orang tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi. Persentase Tenaga Ahli Madya sebesar 56%. Sedangkan tenaga ahli muda dan utama masing-masing memiliki persentase sebesar 39% dan 5%. Berdasarkan klasifikasi bidang, tenaga ahli terbanyak yaitu bidang sipil sebesar 55,63%.

Tenaga ahli yang telah tersertifikasi tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi yang memiliki tenaga ahli terbanyak adalah provinsi Kepulauan Riau sebesar 49.523, Riau sebesar 42.644 dan DKI Jakarta sebesar 32.931.



Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi



Keterangan



Madya

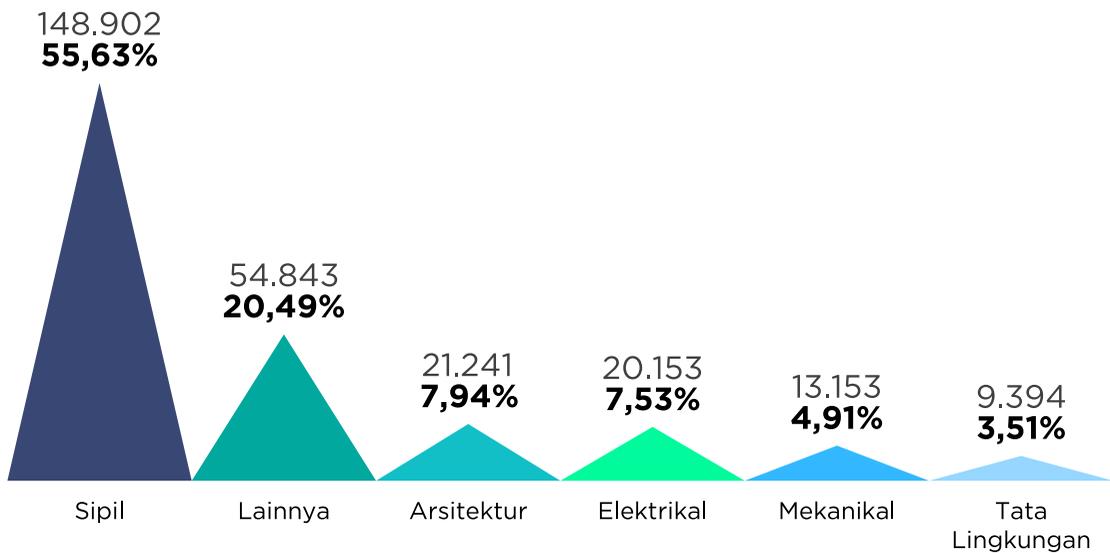


Muda

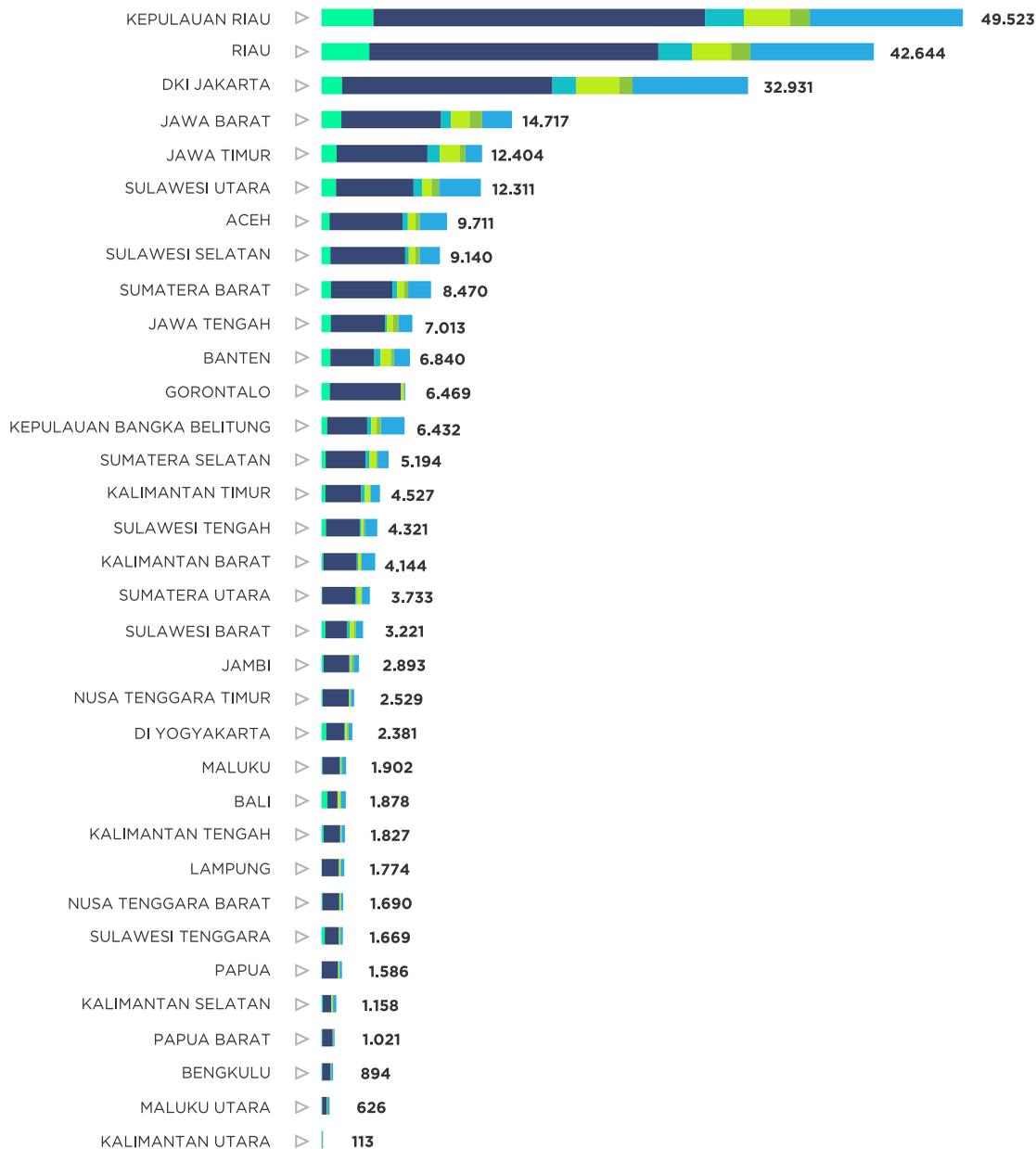


Utama

Tenaga Ahli Konstruksi Berdasarkan Klasifikasi Bidang



Sebaran Tenaga Ahli Konstruksi Berdasarkan Klasifikasi Bidang



2. TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Kualifikasi tenaga terampil yaitu kelas III, kelas II, dan kelas I. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga terampil adalah sebagai berikut:

- a. Kelas I : minimal lulusan D1 dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- b. Kelas II : minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- c. Kelas III : minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun.

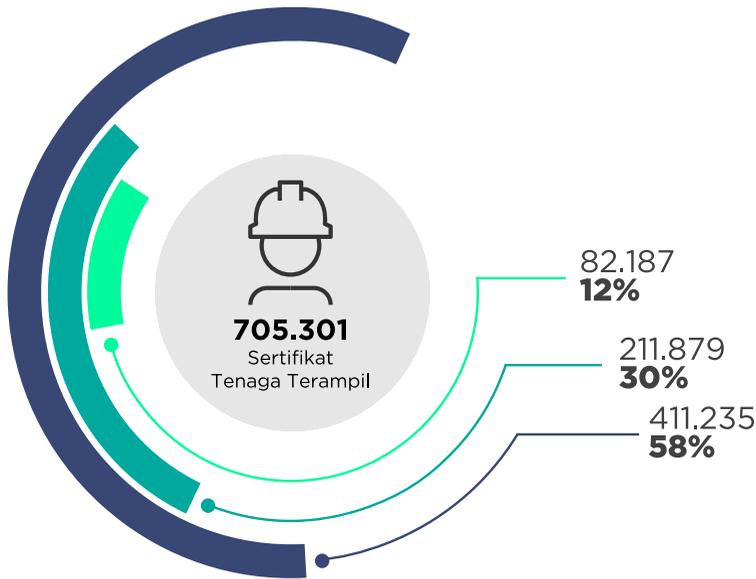
Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungasian dan/atau keterampilan tertentu. Setiap badan usaha jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3) yang akan mengajukan permohonan sertifikat dan registrasi badan usaha harus memiliki tenaga kerja terampil bersertifikat, sebagai persyaratan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Indonesia memiliki 705.301 tenaga kerja bersertifikat terampil. Tenaga terampil dengan SKT Kelas I sebesar 58%. Sedangkan persentase kelas II dan kelas III sebesar 12% dan 30%. Tenaga terampil terbanyak dari bidang sipil sebesar 49% dan arsitektur sebesar 32%.

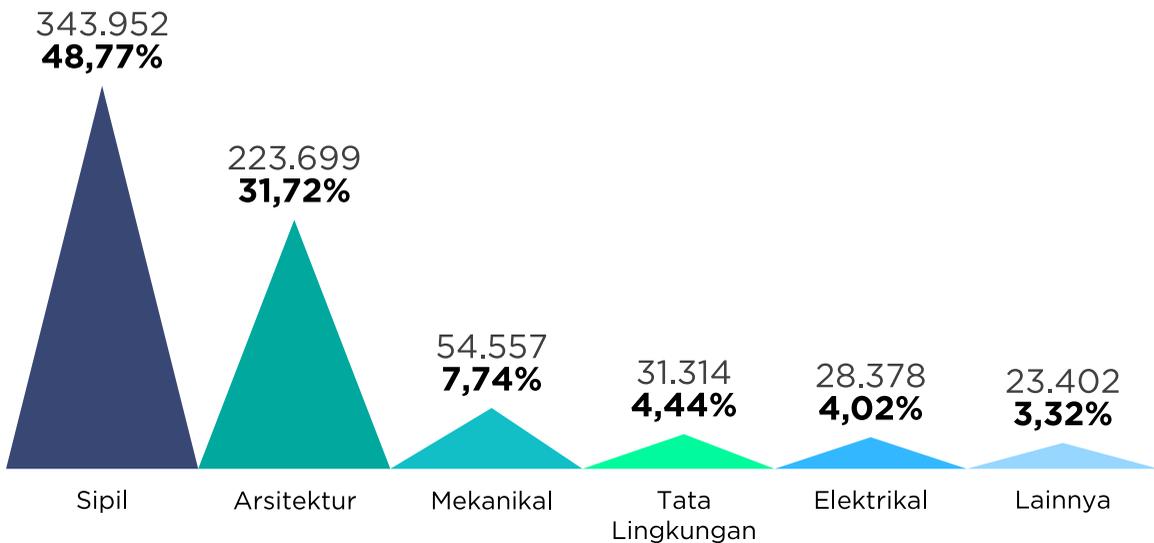
Tenaga terampil yang telah tersertifikasi tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi yang memiliki tenaga terampil terbanyak adalah provinsi Kepulauan Riau sebesar 131.767 dan Riau sebesar 112.417.



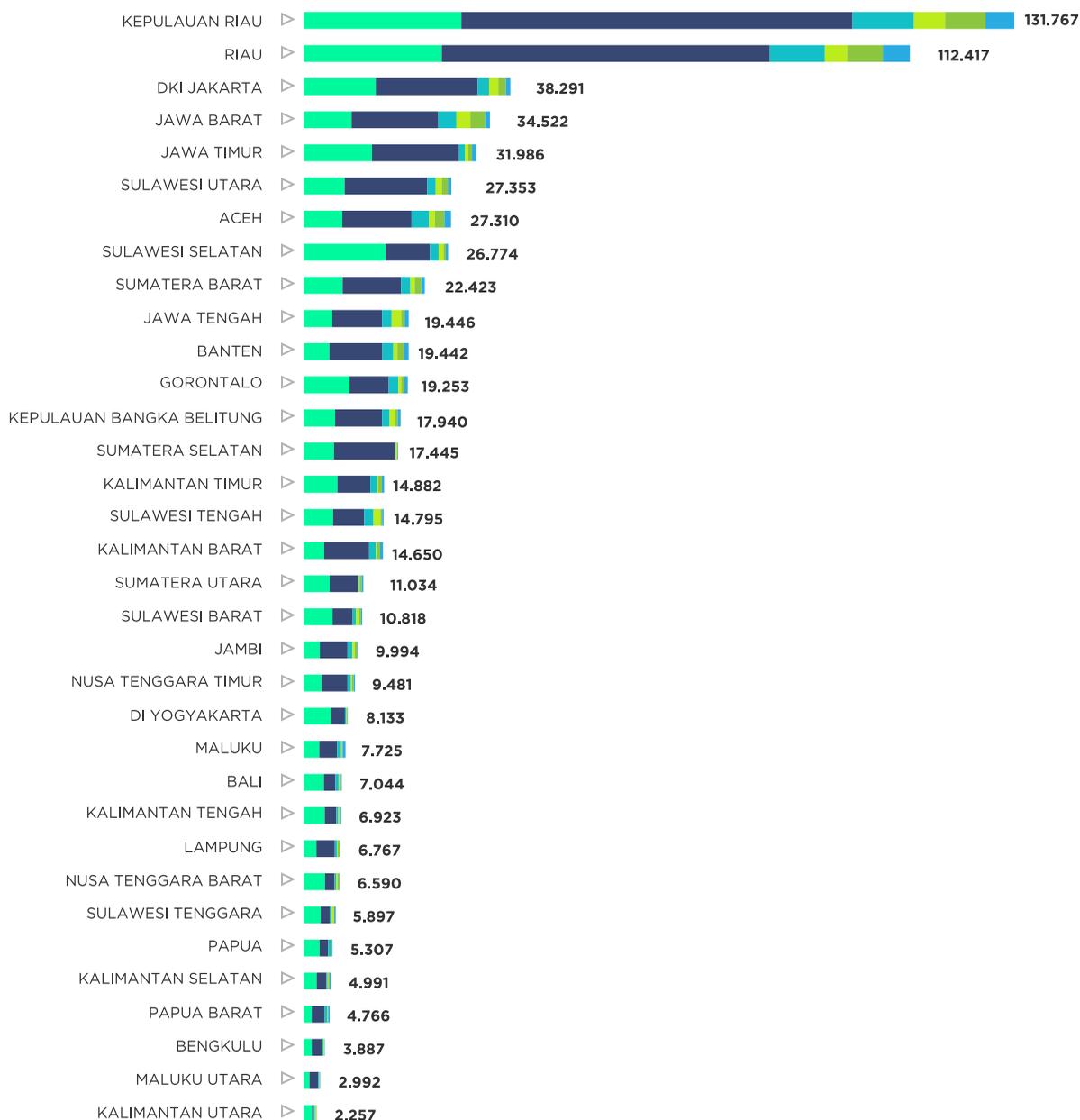
Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi



Tenaga Terampil Konstruksi Berdasarkan Klasifikasi Bidang



Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi



Keterangan



Arsitektur



Sipil



Mekanikal



Elektrikal

Tata
Lingkungan

Lainnya

Sumber

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, <http://binakonstruksi.pu.go.id/data-bidang-konstruksi/badan-usaha-jasa-konstruksi> (status 3 juli 2020)





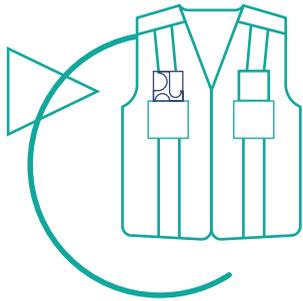
SUMBER DAYA MANUSIA PUPR





CONTENT

- • • • •
- ▶ Jumlah Pegawai
- ▶ Pengarusutamaan Gender



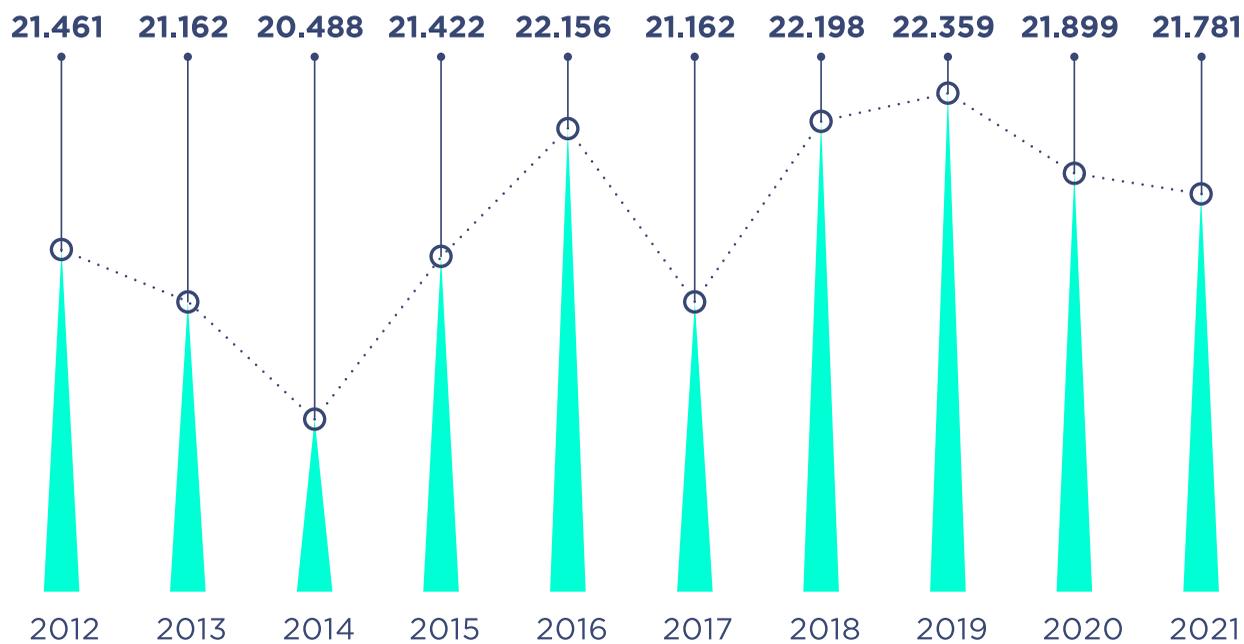
SDM KEMENTERIAN PUPR

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Peran penting SDM dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai perancang, penyusun, pelaksana, serta pengawas. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM Kementerian PUPR dirasa perlu dilakukan guna menunjang pembangunan infrastruktur. Jumlah pegawai Kementerian PUPR mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Perkembangan jumlah pegawai kementerian PUPR tahun 2012 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 - 2016 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dalam Perpres tersebut ditetapkan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sehingga terjadi peningkatan jumlah pegawai. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dikarenakan adanya rekrutmen CPNS pada tahun 2017 dan tahun 2018.



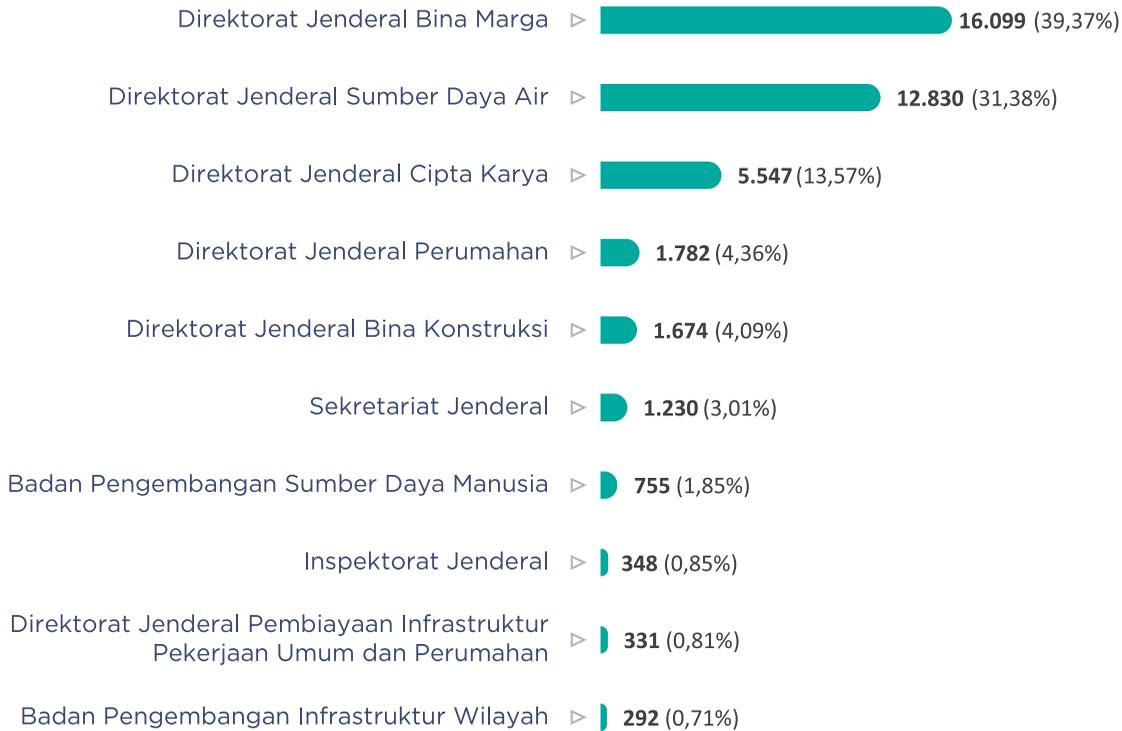
Jumlah Pegawai 2012-2021



Total jumlah SDM pada tahun 2021 sebanyak 21.781 pegawai. Kementerian PUPR memiliki 11 unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki jumlah pegawai terbanyak adalah Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak 39,37% dari keseluruhan jumlah pegawai Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menempati posisi kedua dengan persentase jumlah pegawai mencapai 31,38%.

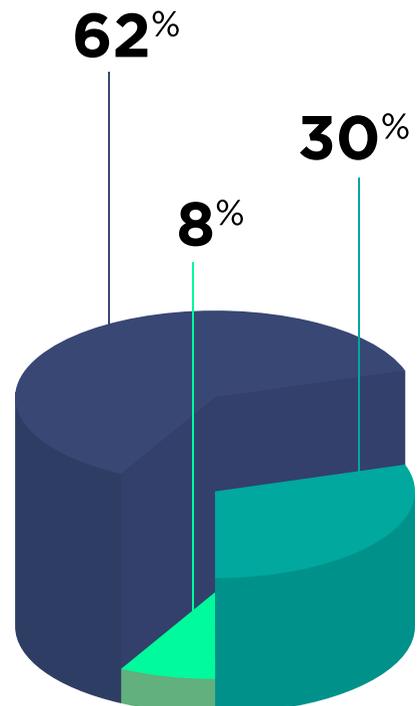


Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Organisasi



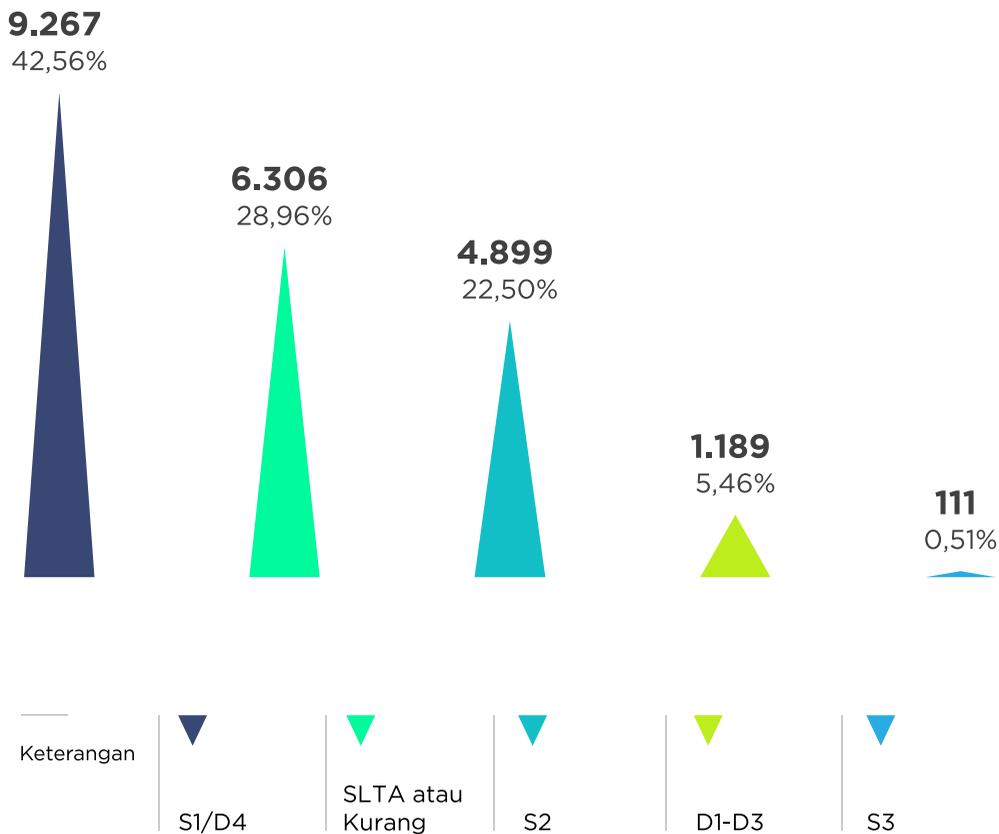
Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai Kementerian PUPR tahun 2021 golongan IV terdapat 1.656 pegawai atau sebesar 8% Pegawai dengan golongan III sebanyak 13.598 pegawai atau sebesar 62%. Pada golongan II dan kurang terdapat 6.523 pegawai atau sebesar 30%.

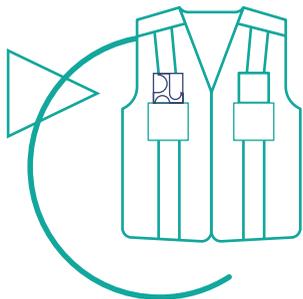
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan jenjang pendidikan, Pegawai yang lulus dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 9.267 pegawai atau sebesar 42,56% yang artinya pegawai Kementerian PUPR paling banyak berpendidikan terakhir S1. Pegawai Kementerian PUPR dengan pendidikan SMA ke bawah sebanyak 6.306 pegawai atau sebesar 28,96%. Sebanyak 4.899 pegawai atau sebesar 22,50% pegawai Kementerian PUPR merupakan lulusan S2. Kemudian 5,46% atau 1.189 pegawai lainnya merupakan lulusan diploma.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan





PENGARUSUTAMAAN GENDER

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Bila hasil pembangunan belum dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan.

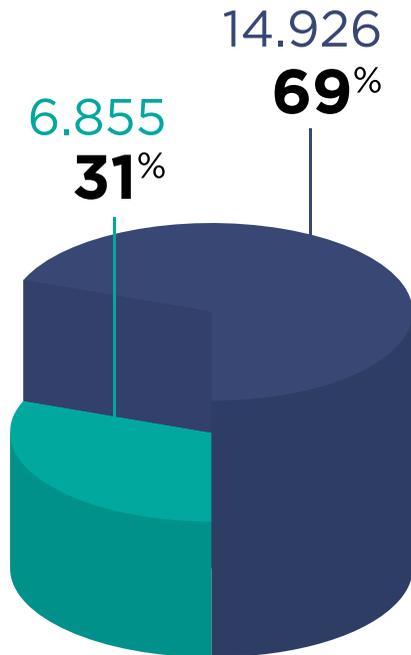
Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama.

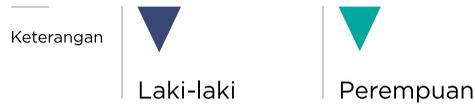
Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan difabel. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PUPR yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR. Secara umum pegawai Kementerian PUPR didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 69%. Sedangkan pegawai perempuan sebesar 31%. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun hal tersebut tidak menutup kesempatan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



▶ Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan



Dari total keseluruhan jumlah pegawai, persentase pegawai perempuan terbesar dari unit organisasi Inspektorat Jenderal sebesar 52,61%. Persentase pegawai perempuan yang menempati posisi kedua dari unit organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 49,26%

▶ Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan





PENUTUP





BUKU INFORMASI STATISTIK

• • • • •

2021



..... PENUTUP

Buku tahunan ini dibuat dengan struktur sesuai ketersediaan data infrastruktur walidatanya, format data agregat menurut provinsi dan juga dapat berbeda dalam hal penekanan informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an beserta beberapa dokumentasinya, selain itu juga terjadi perubahan nomenklatur pada struktur organisasi

yang menjadikan data tersebut dapat mengalami perubahan seperti pada perubahan nama Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rintisan nama Buku Informasi Statistik per tahun seperti berikut:

- 2006 : Buku Induk Kestatistikan
- 2007 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2008 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2009 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2010 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2011 : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2012 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
- 2013 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
- 2014 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum
- 2015 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2016 : Buku Induk Statistik
- 2017 : Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2018 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2019 : Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





Dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. Serta diharapkan dapat melengkapi dan memberikan data dan informasi bidang PUPR tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah.

Pusdatin telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengembangan sistem informasi guna mendukung manajemen Kementerian PUPR untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat memberi manfaat tak hanya bagi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR namun juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Selain itu peningkatan kerjasama antar unit organisasi dapat ditingkatkan, sehingga pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat dilakukan sebagai masukan kegiatan dan menghasilkan produk yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional.

